

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENKOOORDINASI PEMBANGUNAN
FISIK DI DESA PEMATANG TINGGI KECAMATAN KERUMUTAN
KABUPATEN PELALAWAN (TAHUN 2018)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

Rika Naftalani
147310438

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Rika Nufalani
NPM : 147310438
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi
Pembangunan Fisik Di Desa Pematang Tinggi
Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (Tahun
2018).

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu di nilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pembimbing I

Drs. H. Zaini Alf, M. Si

Pekanbaru, 04 April 2019

Pembimbing II

Data Wardana, S.Sos, M.IP

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Budi Mulianto, S. IP., M. S

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Rika Naftalani
NPM : 147310438
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi
Pembangunan Fisik Di Desa Pematang Tinggi
Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (Tahun
2018).


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai,relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah,oleh karena itu Tim Penguji Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.


Pekanbaru, 28 Maret 2019


Ketua,


Dr. Khoirul Rahman., S. Sos., M. Si

Sekretaris,


Yendri Nazir., S. Sos., M. Si
Anggota,


Nina Yustiani, S.IP., M. Si
Anggota,


Drs. H. Zaini AL., M. Si
Anggota,


Data Wardana, S.Sos, M.IP

Mengetahui,
Wakil Dekan I Bidang Akademik


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S. IP., M. Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor 257/UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 27 Maret 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 28 Maret 2019 jam 14.00 – 15.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Rika Naftalani
NPM : 147310438
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa dalam Mengkoordinasi Pembangunan Fisik di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (Tahun 2017).
Nilai Ujian : Angka : * 7,6 * : Huruf : * B+ *
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si. | Ketua | 1.  |
| 2. | Yendri Nazir, S.Sos., M.Si. | Sekretaris | 2.  |
| 3. | Nina Yustaini, S.IP., M.Si. | Anggota | 3.  |
| 4. | Drs. H. Zaini Ali, M.Si. | Anggota | 4.  |
| 5. | Data Wardana, S.Sos., M.IP. | Anggota | 5.  |
| 6. | Agung Wicaksono, MPA | Notulen | 6.  |

Pekanbaru, 28 Maret 2019
An. Dekan,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan Bidang Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 295/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama | : Rika Naftalani |
| N P M | : 147310438 |
| Program Studi | : Ilmu Pemerintahan |
| Jenjang Pendidikan | : Strata Satu (S.1) |
| Judul Skripsi | : Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Fisik Di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (Tahun 2017).. |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Yendri Nagir, S.Sos., M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Nina Yuslani, S.IP., M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Drs. H. Zaini Ali, M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 5. Data Wardana, S.Sos., M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 6. Agung Wicaksono, MPA | Sebagai Nottulen |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 Maret 2019
An. Dekan

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsipsk.penguji.....

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rika Nafialani
NPM : 147310438
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi
Pembangunan Fisik Di Desa Pematang Tinggi
Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (Tahun
2018).

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis,oleh karna itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 04 April 2019

An.Tim Penguji,
Sekretaris

Ketua,

Dr. Khaizal Rahman., S. Sos., M. Si

Yendri Nazir., S. Sos., M. Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin,S,IP.,M.Si

Budi Mulianto,S.IP.,M.Si

Persembahan

Sujud syukur ku ucapkan pada Allah SWT yang maha kuasa, berkat dan rahmat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran kehidupan yang diberikannya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi ku pada orang orang tersayang.

Kedua orang tua ku Bapak Ngadimin dan Ibunda ku Wadiyem tercinta yang tak pernah lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.

Kakak ku beserta suaminya Ida Royani & Yulianto dan Keponakanku Safa'ati Sofia Rahmadhani dan Gibran Rasydan Ahnaf yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayangnya.

My lovely Bima Agung Tran Saputra yang selalu menyemangatiku, memberi motivasi serta dukungan.

Sahabat seperjuangan ku IP (Ilmu Pemerintahan) kelas G Fika Fikrina S.IP, Diska Nanda Riskita S.IP, Novitasari S.IP, Deska Kurnia S.IP, Herita Fitriyani S.IP, Arbaiyah S.IP, Yola Indah Saputri S.IP, Riza Andika Putra S.IP, Ade Saputra S.IP, Eko Putra Siswanto S.IP, Asril S.IP. Sahabat perantauanku Tukiman, Andri Priyanto. Yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa perkuliahan, susah senang dirasakan bersama dan sahabat- sahabat seperjuanganku yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Terimakasih buat kalian semua.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah penulisan skripsi ini yang berjudul **“Peran Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Fisik Di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (Tahun 2018)”**. Salam shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suritauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman. Penulis skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada **Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau**, dimana penulis menekuni ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan penulis tentang ilmu-ilmu soial dan ilmu politik.

Dalam penulisan skripsi ini penilis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH, MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam membina ilmu di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Drs. H. Zaini Ali, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Data Wardana, S.Sos., M.IP selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Seluruh Dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, khususnya dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Karyawan-karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi.
8. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Tercinta Ngadimin dan Ibunda tercinta Wadiem, yang telah memberikan doa restu, semangat, motivasi dan limpahkan kasih sayangnya yang tiada henti dan tidak ternilai harganya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selalu mendoakan, dan tidak pernah letih memberikan motivasi dan dukungan secara moril maupun materil selama

penulis menyelesaikan studi. Kepada orang-orang yang saya sayangi Teman-teman Ilmu Pemerintahan kelas G Angkatan 2014 yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi, penulis mengucapkan terimakasih atas semuanya.

9. Kepada Pegawai Di Kantor Desa Pematang Tinggi yang telah memberikan saya izin untuk diteliti, serta telah mempermudah dalam pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini agar dapat terselesaikan dengan baik dan jelas.

Akhir kata hanya ucapan terimakasih yang dapat penulis berikan, semoga Allah SWT membalas jasa-jasa pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Semoga naskah skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Wabillahitaufikwalhidayah, wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 04 April 2019

Penulis

Rika Naftalani

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING..... | ii |
| PERSETUJUAN TIM PENGUJI | iii |
| BERITA ACARA KONFERENHEN..... | iv |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xvi |
| PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH..... | xvii |
| ABSTRAK | xviii |
| ABSTRACT | xix |
| BAB I: PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 17 |
| C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian..... | 17 |
| a. Tujuan Penelitian | 17 |
| b. Kegunaan Penelitian..... | 18 |
| BAB II: STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR | 19 |
| A. Studi Kepustakaan..... | 19 |
| 1. Teori Pemerintahan | 19 |
| 2. Konsep Pemerintahan Desa..... | 21 |
| 3. Teori Peranan | 24 |
| 4. Konsep Koordinasi..... | 33 |
| 5. Konsep Pembangunan | 42 |
| B. Penelitian Terdahulu | 46 |
| C. Kerangka Pikir | 48 |
| D. Konsep Operasional | 50 |
| E. Operasionalisaisi Variabel | 51 |
| F. Teknik Pengukuran | 52 |
| BAB III: METODE PENELITIAN..... | 55 |
| A. Tipe Penelitian | 55 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B. Lokasi Penelitian..... | 55 |
| C. Populasi dan Sampel | 55 |
| D. Teknik Penarikan Sampel | 57 |
| E. Jenis Dan Sumber Data | 57 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 58 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 60 |
| H. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian..... | 61 |
| I. Sistematika Laporan Penelitian..... | 61 |
| BAB IV: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN..... | 63 |
| A. Sejarah Singkat Desa Pematang Tinggi | 63 |
| B. Keadaan Penduduk..... | 67 |
| C. Keadaan Sosial dan Ekonomi..... | 68 |
| D. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Pematang Tinggi | 72 |
| E. Tugas dan Fungsi struktur organisasi Desa Pematang Tinggi | 73 |
| BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 83 |
| A. Identitas Responden | 83 |
| B. Hasil dan Pembahasan Peran Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Fisik di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (Tahun 2018)..... | 86 |
| C. Hambatan Tentang Peran Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Fisik di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan | 99 |
| BAB VI: PENUTUP..... | 101 |
| A. Kesimpulan | 101 |
| B. Saran..... | 102 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | 103 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| I.I Nama Desa Dan Kelurahan Beserta Jumlah Penduduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan | 12 |
| I.II Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin Dan Jumlah KK Di Desa Pematang Desa Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan..... | 14 |
| I.III Pembangunan Yang Dilakukan Di Desa Pematang Tinggi Periode 2018 | 14 |
| I.IV Rencana Pembangunan Yang Dilakukan Di Desa Pematang Tinggi Periode 2018..... | 16 |
| II.I Penelitian Terdahulu..... | 46 |
| II.II Konsep Operasional Variabel Mengenai Peran Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Fisik Di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan..... | 51 |
| III.I Jumlah Populasi Dan Sampel Penelitian Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Fisik Di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.... | 56 |
| III.II Jadwal Dan Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Fisik Di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.... | 61 |
| IV.I Tabel tokoh yang pernah menjabat sebagai Perangkat Desa adalah sebagai berikut..... | 65 |
| IV.II Jumlah Penduduk dirinci menurut jenis kelamin dan jumlah KK di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupten Pelalawan..... | 67 |
| IV.III Keadaan Penduduk Desa Pematang Tinggi berdasarkan mata pencaharian | 68 |

| | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| IV.IV | Tingkat Pendidikan masyarakat..... | 69 |
| IV.V | Jenis sarana pendidikan..... | 70 |
| IV.VI | Keadaan agama masyarakat Desa Pematang Tinggi | 71 |
| IV.VII | Aparat pemerintahan Desa Pematang Tinggi..... | 72 |
| V.I | Jenis Kelamin responden..... | 83 |
| V.II | Tingkat Usia Responden..... | 84 |
| V.III | Tingkat Pendidikan responden..... | 85 |
| V.IV | Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Pembangunan..... | 88 |
| V.V | Tanggapan Responden Tentang Pembagian Kerja..... | 91 |
| V.VI | Tanggapan Responden Tentang Komunikasi..... | 94 |
| V.VII | Tanggapan Responden Tentang Pengawasan..... | 96 |
| V.VIII | Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Peran Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Fisik Di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (Tahun 2018).. | 98 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| II. II Kerangka Pemikiran Peran Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Fisik Di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan | 49 |
| IV.I Struktur organisasi Kantor Desa PematangTinggi..... | 82 |



DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 : Kuisisioner Untuk perangkat desa dan masyarakat..... | 106 |
| 2 : Daftar wawancara untuk Kepala Desa..... | 110 |
| 3 : Rekapitulasi (Telly) Jawaban responden Peran Kepala Desa dalam Mengkoordinasi Pembangunan Fisik Di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (Tahun 2018)..... | 113 |
| 4 : Dokumentasi Penelitian..... | 115 |
| 5 : SK Dekan Fisipol UIR No:1090/UIR-Fs/Kptsp/2017 Tentang Penetapan dosen pembimbing penulisan skripsi mahasiswa..... | 124 |
| 6 : Rekomendasi No:503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/15457 Tentang pelaksanaan kegiatan riset atau pra riset dan pengumpulan Data untuk bahan skripsi | 125 |
| 7 : Rekomendasi No:504/DPMPTSP/2018/19 Tentang Pelaksanaan kegiatan Riset/Pra riset dan pengumpulan data untuk bahan penelitian..... | 126 |
| 8 : Konfirmasi pelaksanaan riset/ pra riset dan pengumpulan data untuk skripsi No:140/PMT/XII/2018/085 | 127 |
| 9 : Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skripsi No:245/A_UIR/5-FS/2019..... | 128 |
| 10 : Surat Keterangan Jurnal Online Mahasiswa No:540/A_UIR/5-FS/2019..... | 129 |

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

Peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rika Naftalani
NPM : 147310438
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Fisik Di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (Tahun 2018).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Islam Riau.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas Islam Riau.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 04 April 2019

:laku Pernyataan



Rika Naftalani

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENGKOORDINASI PEMBANGUNAN
FISIK DI DESA PEMATANG TINGGI KECAMATAN KERUMUTAN
KABUPATEN PELALAWAN (TAHUN 2018)**

ABSTRAK

Oleh : Rika Naftalani

Kata Kunci: Peran, Koordinasi, Pembangunan

Pembangunan pada dasarnya adalah upaya terencana dan terprogram secara terus menerus oleh satu negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Keberhasilan implementasi pembangunan tergantung pada pilihan tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan ini. Agar proses pembangunan dapat dilakukan sesuai dengan yang diharapkan, maka salah satu aspek yang dipertimbangkan adalah koordinasi dari aparat pelaksana pembangunan. Koordinasi adalah salah satu cara untuk menyatukan upaya masing-masing orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan atau unit kerja yang ada di suatu daerah untuk memfasilitasi proses pembangunan, terutama pembangunan yang sesuai dengan tuntutan otonomi daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan, sehingga tujuannya dari pelaksana pembangunan di suatu daerah dapat dicapai. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan adalah perencanaan, pembagian kerja, komunikasi dan pengawasan. Metode penelitian ini adalah kuantitatif yang berbentuk analisis deskriptif dengan tipe penelitian survey. Penelitian ini berlokasi di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Dalam penelitian ini penulis menetapkan sampel sebanyak 105 orang dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Fisik Di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (Tahun 2018) cukup berperan dengan besar responden 43 orang atau 40,95% responden, karena kepala desa kurang dalam berkoordinasi langsung dengan masyarakat tentang pembangunan fisik di desa.

**ROLE OF VILLAGE HEADS IN COORDINATING PHYSICAL
DEVELOPMENT IN HIGHER VILLAGE VILLAGE KERUMUTAN DISTRICT
PELALAWAN DISTRICT (2018)**

ABSTRACT

By: Rika Naftalani

Keywords: Role, Coordination, Development

Development is basically a planned and programmed effort by one country to create a better society. The success of the implementation of development depends on the choice of objectives to be achieved by using resources to achieve these goals. So that the development process can be carried out according to what is expected, then one aspect that is considered is the coordination of the development implementing apparatus. Coordination is one way to unite the efforts of each responsible person for implementing development or existing work units in an area to facilitate the development process, especially development that is in accordance with the demands of regional autonomy to achieve established development goals, so that the objectives of the development implementers in an area can be achieved. In this study the indicators used are planning, division of labor, communication and supervision. This research method is quantitative in the form of descriptive analysis with the type of survey research. This research is located in Pematang Tinggi Village, Kerumutan District, Pelalawan Regency. In this study the authors determined a sample of 105 people with a purposive sampling technique. The results showed that the role of the village head in coordinating physical development in Pematang Tinggi Village, Kerumutan Sub-District, Pelalawan District (2018) had a significant role with 43 respondents or 40.95% respondents, because the village head was lacking in direct coordination with the community about physical development in village

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik atau lebih dikenal dengan Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ini secara tegas tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, “Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Indonesia dibagi atas daerah provinsi, kabupaten dan kota serta yang terendah adalah desa, yang mana semua daerah tersebut memiliki pemerintahan yang otonomi dan diakui oleh pemerintah

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menyebutkan bahwa daerah:

“kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Republik Indonesia”.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa desa:

“Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam setiap pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada pemerintahan desa untuk mengatur urusan yang ada di desa dalam membangun desa yang lebih baik. Seluruh stake holder masyarakat menjadi salah satu hal penting untuk upaya pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh untuk mendapatkan keberhasilan yang diinginkan. Seluruh stake holder masyarakat menjadi salah satu hal penting untuk upaya pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh untuk mendapatkan keberhasilan yang diinginkan.

Pembangunan desa itu sebagian dari pembangunan nasional dan daerah pada dasarnya merupakan keseluruhan upaya dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berencana oleh pemerintahan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai segala aspek kehidupan baik ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan pemerintahan perlu memikirkan program-program penguatan organisasi masyarakat ditingkat desa. Kepala desa bersama dengan BPD sangat berperan dalam

upaya pembangunan desa. Pemimpin harus bisa berkoordinasi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat di desa. Supaya kegiatan atau program pemerintah lebih terarah maka diperlukan pemimpin yang ada didesa dalam mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pembangunan fisik yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintahan, dengan maksud untuk mengadakan kegiatan kearah perubahan yang lebih baik dan perubahan tersebut dapat dilihat secara konkrit, nyata dari bentuk perubahannya. Dengan kata lain bahwa perubahan itu identic dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti adanya gedung-gedung, sarana perumahan, sarana peribadahan, sarana pembuatan jalan, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan secara fisik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu objek secara tersusun untuk menghasilkan hasil yang lebih baik dari pada sebelumnya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa pada pasal 46 ayat 1 menyebutkan Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat yang dimaksud terdiri dari:

- a. Tokoh adat
- b. Tokoh agama

- c. Tokoh masyarakat
- d. Tokoh pendidikan
- e. Perwakilan kelompok tani
- f. Perwakilan kelompok nelayan
- g. Perwakilan kelompok perajin
- h. Perwakilan kelompok perempuan
- i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak
- j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Poin-poin yang harus diperhatikan dalam melakukan rencana pembangunan yaitu dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan, lokasi yang akan diadakannya pembangunan dan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan pembangunan itu, serta keuntungan apa yang didapat masyarakat dari pembangunan fisik itu. Agar berguna dan bermanfaat untuk masyarakat desa tersebut.

Pemerintahan desa adalah kepala desa dan perangkatnya sebagai unsur penyelenggaraan desa serta badan permusyawaratan desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kedua organisasi ini, memerlukan kriteria memimpin supaya dapat membawa masyarakat kearah yang lebih baik dan berdasarkan tujuan dan sasaran yang diinginkan oleh pemerintahan daerah.

Pemerintahan desa menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 tentang Desa adalah “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada BAB IV kewenangan Desa pasal 18 meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan pemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Selanjutnya pasal 19 kewenangan desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 25 Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 (2), kepala desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;

- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya keakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa,
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;**
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini berfokus pada point M yaitu Koordinasi berhubungan dengan upaya mengarahkan, menyeimbangkan, menyatupadukan, menyelaraskan, mensinkronisasikan, menyatukan kegiatan dari orang-orang, sekumpulan orang

dalam suatu organisasi atau antar organisasi sehingga program yang dilaksanakan menjadi terarah, tertib, dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Sugandha, 1998).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika,
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa,
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa,
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan,
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender,
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme,
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa,
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik,
- i. Mengelola keuangan dan aset Desa,
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa,
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa,

- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa,
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa,
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa,
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Pada Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) tugas dan fungsi Kepala Desa dimaksudkan pada bagian 2 Pasal 6. Pada ayat 1 disebutkan Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa. Pasal 2 menyebutkan, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya dalam Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) disebutkan dalam Pasal 6 ayat 3 fungsi Kepala Desa seperti:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah

- b. Melaksanakan pembangunan, seperti sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motifasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Selanjutnya Kepala Desa melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan cara:

1. Melakukan koordinasi antara kepala desa dengan Camat selaku Pembina dan Pengawas, BPD, LPMD dan komponen masyarakat desa;
2. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Kepala Desa mengenai prosedur penyusunan dan penetapan kerangka acuan pembangunan desa; dan
3. Perlu adanya sikap keterbukaan antara Kepala Desa dengan lembaga pemerintahan desa dan komponen masyarakatnya, jadi tidak mengedepankan sikap ego sektoral dari Kepala Desa sebagai pemimpin desa.

Dalam Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 81 ayat (2) menyebutkan bahwa Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan mengikut sertakan semua masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

Pembangunan yang dimaksud terdapat dalam Undang-undang Desa No.6 tahun 2014 Pasal (2) yakni Pembangunan kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan Partisipatif. kemudian pada pasal (3) Pembangunan Kawasan perdesaan meliputi:

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/kota;
- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Paradigma pembangunan saat ini mengalami perubahan yang semakin cepat. Sehingga dibutuhkan para aparatur pemerintah yang benar-benar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang terus berubah, saat ini tuntutan masyarakat yang mengenai

pelayanan kepada masyarakat merupakan faktor yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya desa.

Pembangunan dengan pendekatan partisipasi masyarakat dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu jika pembangua dilakukan tidak berlawanan arah dengan kepentingan masyarakat maka tingkat partisipasi masyarakat jelas tinggi, ini dimungkinkan bahwa dalam formulasi kebijakan dan pekerjaan proyek pembangunan masyarakat dilibatkan secara langsung.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwa Desa adalah:

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.

Sesuai dengan kewenangan kepala desa dalam kepemimpinannya untuk melakukan kegiatan pembinaan terhadap swakarsa masyarakat dalam pembangunan didaerahnya, keberhasilan kepala desa dalam kepemimpinan wilayahnya, akan terpulang kepada kemampuan kepala desa itu sendiri di dalam memimpin untuk mempengaruhi pola pikir, pola sikap tindak masyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi dan kerjasama untuk mencapai tujuan program pemerintah mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pada periode kepemimpinan kepala desa pada tahun 2018 pembangunan yang ada cukup mengalami perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Desa Pematang Tinggi mulai berbenah diri dan melakukan perbaikan-perbaikan setelah cukup banyak perubahan yang dilakukan dari segi pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Pematang Tinggi Kecamatan kerumutan Kabupaten Pelalawan, pembangunan yang telah terjadi masih banyak pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana awal pembangunan. Pembangunan yang ada sampai saat ini diantaranya: kegiatan pembangunan semenisasi jalan desa, gorong-gorong jalan dan jaringan listrik.

Kecamatan Kerumutan merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Pelalawan yang memiliki luas $960,03 \text{ km}^2$ atau 6,89 % dari total wilayah kabupaten Pelalawan. Yang memiliki jumlah Desa sebanyak 10 Desa.

Tabel I.I: Nama Desa dan Kelurahan beserta Jumlah Penduduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

| No | Nama Desa/ Kelurahan | Jumlah Penduduk |
|----|-------------------------|-----------------|
| 1. | Desa Banjar Panjang | 1371 Jiwa |
| 2. | Desa Beringin Makmur | 2610 Jiwa |
| 3. | Desa Bukit Lembah Subur | 2996 Jiwa |
| 4. | Desa Lipai Bulan | 535 Jiwa |
| 5. | Kelurahan Kerumutan | 4470 Jiwa |
| 6. | Desa Pematang Tinggi | 2351 Jiwa |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|------------------------|-----------|
| 7. | Desa Pangkalan Panduk | 1348 Jiwa |
| 8. | Desa Makeduh | 2456 Jiwa |
| 9. | Desa Tanjung Air Hitam | 995 Jiwa |
| 10. | Desa Pangkalan Tampo | 1752 Jiwa |

Sumber: Kantor Camat Kerumutan 2018

Dari ke 10 Desa dan satu kelurahan yang ada di Kecamatan Kerumutan, hanya 1 (satu) Desa yang akan penulis teliti, adalah Desa Pematang Tinggi. Alasan penulis memilih Desa tersebut dikarenakan letak Desa Pematang Tinggi paling jauh dari Kecamatan dan pembangunan secara fisik belum merata.

Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dengan jumlah penduduknya 2351 orang terdiri dari 1180 laki-laki dan 1171 perempuan dengan jumlah KK 711 di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, beberapa keseluruhan masih belum berkembang sebagaimana diharapkan.

Untuk tingkat perkembangan atau kemajuan Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan .

Table I.II: Jumlah penduduk dirinci menurut jenis kelamin dan jumlah KK di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

| No | Desa | Jenis Kelamin | | Jumlah KK | Jumlah |
|----|-----------------|---------------|-----------|-----------|--------|
| | | Laki-laki | Perempuan | | |
| 1 | Pematang Tinggi | 1180 | 1171 | 711 | 2351 |

Sumber: Kantor Desa Pematang Tinggi

Desa Pematang Tinggi merupakan salah satu desa yang berada dikecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Desa ini merupakan desa transmigrasi, jika dilihat dari jenisnya desa ini termasuk dalam jenis desa campuran (genelogis dan teritorial). Kemudian dalam rangka mengisi pembangunan, maka Pemerintah desa Pematang Tinggi Tahun 2018 telah menyusun dan menetapkan pembangunan fisik melalui musrembang. Untuk jelasnya hasil musrembang pembangunan fisik Desa Pematang Tinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Table I.III: Pembangunan yang dilakukan di Desa Pematang Tinggi Tahun 2018

| No | Pembangunan | Uraian | Lokasi | Sumber dana | Jumlah dana |
|----|--------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|-----------------|
| 1 | Pemasangan | 10 unit | Dusun | ADD | Rp. 2,117,500 |
| | Trapo 160 kva | | Sawit Mukti | | |
| 2. | Pemasangan Tiang 9 | 40 batang | Dusun Sidomulyo | ADD | Rp. 786,500 |
| 3. | Semenisasi Jalan | 345 meter | RT.05 RW.03 Dusun Palmasari | ADD | Rp. 298,207,100 |
| 4. | Semenisasi Jalan | 371 meter | RT.09 RW.04 Dusun Sawit | ADD | Rp. 365,172,476 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------------------------|------------|-----------------------------------------|-----|-----------------|
| | | | Mukti | | |
| 5. | Semenisasi Jalan | 345 meter | RT.13 RW.08 Dusun Sidomulyo Timur | ADD | Rp. 298,207,100 |
| 6. | Pemasangan Kabel SKOPL | 1751 meter | Dusun Sawit Mukti | ADD | Rp. 47,406,574 |
| 7. | Pemasangan Kabel SKOPL | 2295 meter | Dusun Sidomulyo | ADD | Rp. 62,134,830 |

Sumber: Kantor Desa Pematang Tinggi Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan tabel diatas terdapat pembangunan yang dilakukan di desa pematang tinggi. Salah satu pembangunan yang dilakukan adalah semenisasi jalan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada didesa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 1 ayat 9 menyebutkan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal ini terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintahan untuk pembangunan desa.

Pembangunan desa di desa Pematang Tinggi terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik terdiri dari semenisasi jalan, drainase, dan

pembangunan jalan. Sedangkan pembangunan non fisik terdiri dari pengembangan manusia, ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Table I.IV: Rencana Pembangunan yang dilakukan di Desa Pematang Tinggi tahun 2018

| No | Rencana Pembangunan | Lokasi | Terealisasi | Tidak Terealisasi |
|----|--------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| 1. | Pemasangan Trapo 160 kva | Dusun Sawit Mukti | 100% | |
| 2. | Pemasangan Tiang 9 | Dusun Sidomulyo | 100% | |
| 3. | Semenisasi Jalan | RT.05 RW.03 Dusun Palmasari | 35% | 65% |
| 4. | Semenisasi Jalan | RT.09 RW.04 Dusun | 80% | 20% |
| 5. | Semenisasi Jalan | RT.13 RW.08 Dusun Sidomulyo Timur | 45% | 55% |
| 6. | Pemasangan Kabel SKOPL | Dusun Sawit Mukti | 100% | |
| 7. | Pemasangan Kabel SKOPL | RT.13 RW.08 Dusun Sidomulyo Timur | 100% | |

Sumber: Kantor Desa Pematang Tinggi Tahun 2018

Berdasarkan hal diatas, pelaksanaan pembangunan di Desa Pematang Tinggi yang terlaksana, hampir semuanya sedang berjalan dan ada juga yang masih terbengkalai. Sebagai fenomena yang terjadi dan berkaitan dengan Peran Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi pembangunan Fisik di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (Tahun 2018)

1. Kurangnya peran serta aparaturnya dalam mewujudkan proses pembangunan fisik serta sistem koordinasi yang lemah.

2. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang belum terkoordinasi oleh kepala desa secara maksimal.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut diatas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Peran Kepala Desa dalam Mengkoordinasi Pembangunan Fisik di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (Tahun 2018)”**

B.Rumusan Masalah

Menurut latar belakang diatas, Peranan Kepala Desa Dalam Melakukan pembangunan ini untuk mengetahui secara terperinci apa saja yang menjadi alasan melaksanakan pembangunan dalam menjalankan pemerintahan melakukan pembangunan di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan penelitian yaitu: **“Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Fisik Di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (Tahun 2018)?”**

C.Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yag penulis harapkan yaitu:

- a. Untuk mengetahui peran kepala desa dalam mengkoordinasi pembangunan fisik di desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (Tahun 2018).
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan kemampuan kepala desa dalam mengkoordinasi pembangunan fisik di desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (Tahun 2018).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya pemerintah desa dalam mengkoordinasi pembangunan fisik di desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (Tahun 2018)
- b. Sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dalam kasus yang sama
- c. Sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peranan kepala desa dalam mengkoordinasi pembangunan fisik di desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (Tahun 2018)

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A.Studi Kepustakaan

Sebagai pedoman untuk berfikir penulis dalam menyelesaikan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, “peran kepala desa dalam mengkoordinasi pembangunan fisik di desa Pematang tinggi Kecamatan kerumutan Kabupaten Pelalawan (Tahun 2018)”. Berikut ini dikemukakan Teori dan Konsep yang mendukung berhubungan dengan variabel yang diteliti untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi yaitu sebagai berikut:

1.Teori Pemerintahan

Pemerintah merupakan suatu lembaga yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk jasa. Tuntutan yang diperintah berdasarkan berbagai posisi yang dipegangnya, misalnya sebagai *sovereign*, sebagai pelanggan, consumer, yang-tidak-berdaya, dan sebagainya. Pada dasarnya, proses-proses itu kumulatif: proses *demand-supply*, produksi-konsumsi, pemasaran-“penjualan,” distribusi-ekspedisi, “pembelian” (penerimaan)-penggunaan, dan evaluasi-*feedback (feedforward)*, (dalam Ndraha,2011;5)

Menurut Ndraha (2011;7) Ilmu Pemerintahan merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang pelayanan dan bagaimana memberikan pelayanan berupa jasa-publik kepada orang yang membutuhkan.

Menurut Ndraha (2011;6) Pemerintah merupakan lembaga kewenangan dan berkewajiban dalam memberikan layanan kepada semua orang dengan pemerintahan, supaya masing-masing masyarakat bisa dapat menerima pelayanan pada saat dibutuhkan, sesuai dengan harapan yang diinginkan. Dalam hubungan ini, bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu dan pemerintah wajib melayankannya.

Ada beberapa azas pemerintahan sebagai pedoman atau suatu yang dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan berfikir dan prinsip yang menjadi pegangan yang perlu diketahui menurut Syafiie (2013;40) antara lain sebagai berikut:

- a. Azas Aktif;
- b. Azas Vrij Bestuur;
- c. Azas Freies Ermessen;
- d. Azas Histories;
- e. Azas Etis;
- f. Azas Otomatis;
- g. Azas Detournement de Pouvoir.

Syafiie (2013;20)Pemerintahan merupakan ilmu kesenian. Dapat disebut demikian karena banyak para pemimpin pemerintahan yang tidak berpendidikan pemerintahan.

Tetapi mampu mengemban tugas pemerintahan dan dapat mengikuti jalannya roda pemerintahan. Dan dapat juga disebut dengan disiplin ilmu pengetahuan, karena memenuhi syarat-syarat yang dapat dipelajari dan diajarkan kepada masyarakat, serta sistematis serta spesifik (khas).

Menurut U. Rosenthal (dalam Syafiie, 2013;21) ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang menekuni studi tentang penunjukan cara kerja ke dalam dan ke luar struktur dan proses pemerintah secara umum.

2.Konsep Pemerintahan Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 1 ayat (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian diatas penulis simpulkan bahwa yang termasuk Pemerintah Desa yaitu lembaga yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kaur, Kepala Dusun). Badan Permusyawaratan Desa juga termasuk unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Maka Pemerintahan Desa yaitu Pemerintah Desa ditambah dengan BPD.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 1 ayat (4) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Menurut Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah (2015, 182-183) Terkait dengan keberadaan dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa ini telah dinyatakan dengan jelas dan tegas pada pasal 55 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, terkait dengan hal tersebut, maka dijelaskan keberadaan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi sebagai berikut;

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalur aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberikan fungsi untuk mendiskusikan dan menyetujui berbagai bentuk rancangan peraturan desa bersama-sama dengan kepala desa.
- Badan Permusyawaratan Desa juga berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yang merupakan gambaran

umum dalam merumuskan perencanaan tentang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan

- Badan Permusyawaratan Desa juga diberikan fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja dari kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang didiami atau dihuni oleh sekelompok orang yang saling kenal mengenal satu sama lainnya, memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan sangat identic dengan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri (dalam Rahyunir dkk, 2015:14)

Secara umum desa dipandang sebagai entitas kelompok masyarakat yang dipersepsikan sebagai masyarakat yang jauh dari sentuhan pembangunan dan termajinalkan. Meskipun masyarakat yang berada di pelosok desa yang sebelumnya didominasi oleh cara hidup tradisional, namun tetap saja masyarakat desa tidak dapat menghindar dari proses perubahan, baik secara sosial, ekonomi, politik hingga teknologi (dalam Azam dkk, 2011:160)

Menurut Nurcholis (2011:1) Desa merupakan lembaga pemerintahan yang diberikan hak otonom untuk menjadi badan hukum. Sedangkan kelurahan berkedudukan dibawah pemerintah kabupaten/kota yang diberikan tugas untuk melanjutkan administrasi. Jadi, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya

sebagai tempat beroprasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.

3. Teori Peranan

Nenurut Soekanto (2003:243) (dalam Rahyunir dkk, 2015:98) bahwa, Peranan (*Rule*) adalah status kedudukan. Jika seseorang telah melakukan hak dan kewajiban berdasarkan kedudukannya maka dia telah melaksanakan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Peranan menurut Ambarwati (2009:15), menunjukkan ruang lingkup peran sebagai konsep mengenai apa yang dapat dilakukan dalam suatu perusahaan. Seperti dalam menjalankan perusahaan. Perusahaan tentu tidak dapat lepas dari peran semua elemen perusahaan termasuk hubungan masyarakat.

Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan. Dalam suatu organisasi setiap orang memiliki berbagai karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Tugas-tugas adalah batasan bagi seseorang untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan berdasarkan aturan organisasi

atau lembaga sehingga semua pekerjaan dapat diatur dengan rapi dan dapat dipertanggung jawabkan oleh setiap pegawainya.

Kemudian menurut Riyadi (2002:138) peran juga dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran ini, para pelaku baik individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungan mereka.

Sedangkan menurut Katz dan Kahn (dalam Mifta Thoha, 2002) peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang yang ditentukan oleh karakteristik pribadi seseorang, memahami seseorang tentang apa yang diharapkan orang lain untuk dia lakukan dan kesediaan untuk mematuhi mereka yang telah menetapkan harapan sebelumnya.

a. Pembagian Peran

Pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif merupakan peran yang dilimpahkan oleh anggota kelompok karena posisi mereka dalam kelompok sebagai kegiatan kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lain sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran Partisipatif merupakan peran yang dilimpahkan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan pemberian yang sangat berguna bagi kelompoknya sendiri.

3. Peran Pasif

Peran Pasif merupakan pemberian anggota kelompok yang mempunyai sifat pasif, yang mana anggota kelompok menahan diri untuk bisa memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok agar berjalan dengan dengan baik.

Peranan Kepala Desa yang mencakup dalam hal pembangunan, antara lain;

- a) Peranan perencanaan pembangunan
- b) Peranan pelaksanaan pembangunan
- c) Peranan pemanfaatan pembangunan
- d) Peranan dalam pengembangan pembangunan

Berdasarkan para ahli teori peranan kepala desa dalam hal pembangunan yaitu:

1. Perencanaan

Pengertian Perencanaan, Perencanaan disebut dengan kata lain yaitu planning, yang artinya hal yang sangat penting di dalam management. Karena kegiatan perencanaan ini selalu ada pada kegiatan hidup kita sehari-hari, baik direncanakan

maupun tidak direncanakan. Sebuah perencanaan sangat menentukan sukses atau tidaknya suatu pekerjaan. Oleh karena itu didalam pekerjaan harus memulai sebuah rencana dengan baik untuk menghasilkan hasil yang optimal.

Bintoro Tjokroaminoto (2004:90) mengartikan perencanaan sebagai proses untuk memperoleh sebuah tujuan maka dibutuhkan suatu proses yang teratur demi mencapai sebuah tujuan. Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan perencanaan merupakan susunan prosedur untuk menentukan masa depan yang diikuti dengan pertimbangan yang logis serta berkelanjutan dan bisa memanfaatkan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan tersebut.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu program yang dilakukan oleh suatu lembaga dengan terencana, tersusun dan jelas untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Menurut Westra (2003:17) Pelaksanaan atau implementasi adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan guna melaksanakan seluruh perencanaan dan kebijaksanaan yang sudah ditetapkan untuk melengkapi seluruh kebutuhan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Pelaksanaan adalah melakukan suatu kegiatan yang diutarakan oleh Abdullah (2001:5) Pelaksanaan merupakan proses untuk merangkai sebuah kegiatan untuk meneruskan suatu kebijakan yang telah ditetapkan dalam pengambilan keputusan, cara yang baik akan menjadi kenyataan untuk menggapai tujuan dari kegiatan yang

telah direncanakan dari awal. Dari penjelasan yang diutarakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada sebenarnya pelaksanaan sebuah kegiatan yang sudah ditentukan oleh pemerintahan harus sesuai dengan keadaan yang sudah ada. Keadaan yang ada dilapangan ataupun diluar lapangan. Dimana dalam program tersebut mengikutsertakan berbagai elemen yang diikuti oleh usaha-usaha dan mendapat dukungan dari alat-alat penunjangnya.

3. Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan suatu kegiatan dari masyarakat untuk mencukupi keperluan pada masa kini tanpa harus mengurangi manfaatnya guna untuk melengkapi keperluan dari generasi yang akan datang besok. Suatu pembangunan berkelanjutan harus melihat pemanfaatan lingkungan agar tetap terjaga. Kelestarian lingkungan yang tidak terjaga, akan menimbulkan daya dukung lingkungan berkurang, atau bisa jadi akan hilang. Menurut March Syamsiah Badruddin (2001:47)

4. Pengembangan

Pengembangan pembangunan adalah suatu strategi untuk memanfaatkan dan menggabungkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan tantangan) yang ada sebagai potensi dan peluang yang dapat digunakan sebagai peningkatan produksi pembangunan berupa barang dan jasa yang berupa fungsi dari kebutuhan baik untuk secara internal maupun eksternal. Faktor internal ini terdiri dari

sumber daya alam, manusia dan sumber daya teknologi, sedangkan faktor eksternal yaitu dapat berbentuk peluang dan ancaman yang akan datang bersamaan dengan interaksinya dengan daerah lain.

Menurut Anwar (2005:17), pembangunan dilaksanakan guna untuk menghasilkan tujuan dari pembangunan yang merupakan aspek-aspek pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan yang terdiri dari dimensi lokasi dalam ruang dan berhubungan dengan aspek sosial ekonomi wilayah. Definisi dari pengembangan pembangunan yang ada dalam sejarah dan strategisnya pernah berevolusi atau mengalami perubahan, dimulai dari strategi pembangunan yang mengutamakan pada pertumbuhan ekonomi, lalu pertumbuhan dan kesempatan kerja, pertumbuhan dan pemerataan, mengutamakan kepada kebutuhan yang mendasar, pertumbuhan dan lingkungan hidup, dan pembangunan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada BAB IX Pasal 78 Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan.

b. Pemimpin Adalah Pelayan Masyarakat

Pemimpin merupakan imam yang baik untuk dijadikan panutan. Seorang imam atau pemimpin harus bisa mengemban amanah yang telah dipercayakan. Sebagai seorang pemimpin harus bisa melayani masyarakat, karena pemimpin sudah dipilih oleh rakyatnya. Seseorang yang sudah memilih gelar pemimpin harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Apabila pemimpin tidak menjalankan tugas dan amanahnya maka masyarakat sangat dirugikan, dan hukumannya sangatlah pedih diakhirat kelak. Ajaran islam menuntut untuk melakukan pelayanan yang baik karena jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan ancaman dan siksaan Allah SWT. Hadis nabi SAW :

حَدِيثُ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقَلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقَلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحْطُهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. (أخرجه البخاري في 93-كتاب الأحكام: باب من استرعى رعية فلم ينصح)

Hadist ma'qil bin Yasar, dari hasan bahwasannya Ubaidillah bin yazid mengunjungi Ma'qal bin Yasar ra., ketika ia sakit yang menyebabkan kematiannya, maka Ma'qal berkata kepada Ubaidillah bin Ziyad, "Aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadits yang telah dengar dari Rasulullah saw., aku telah mendengar Nabi saw. bersabda, "Tiada seorang hamba yang diberi amanat rakyat oleh Allah lalu ia tidak memeliharanya dengan baik, melainkan Allah tidak akan merasakan padanya harumnya surga (melainkan tidak mendapat bau surga)" (dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab "Hukum-hukum," bab: Orang yang diberi amanat Kepemimpinan).

Seorang pemimpin dalam islam adalah seseorang yang diberi kepercayaan oleh Allah SWT, untuk memimpin seluruh rakyatnya, yang nanti diakhirat akan

dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT sesuai dengan yang sudah dijelaskan. Oleh karena itu, bagi seorang pemimpin yang dengan sengaja melarikan diri dari suatu tuntutan rakyatnya selama ia didunia, maka ia tidak akan bisa melarikan diri dari tuntutan Allah yang akan didapatkan diakhirat kelak.

Oleh sebab itu pemimpin tidak seharusnya menempatkan dirinya menjadi orang yang paling berkuasa, karena pada hakikatnya manusia hanyalah makhluk ciptaan Allah SWT yang semuanya mempunyai amanat dari Allah Yang Maha Esa, maka dari itu tidak boleh berbuat sesuka hati kepada rakyat yang dipimpinnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an:

وَإِخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. (٢١٥)

Artinya: *“Rendahkanlah sikapmu terhadap pengikutmu dari kaum mukminin”*(QS. Asy-Syu'ara: 215)

Maka dari itu, supaya seluruh umat muslim dapat terhindar dari seorang pemimpin yang dzalim, maka berhati-hatilah atau waspadalah dalam memilih seorang pemimpin. Dalam memilih seorang pemimpin harus benar-benar memperhatikan kualitas, integritas, loyalitas, dan yang paling penting adalah perilakunya terhadap keagamaannya. Jangan kita pilih seorang pemimpin yang hanya pada rasa emosional, baik karena ras, suku bangsa, ataupun juga keturunan. Sebab jika mereka terpilih sebagai seorang pemimpin belum tentu dapat memimpin rakyatnya dengan baik, hal yang seperti itu yang akan mengakibatkan rakyatnya merugi.

Allah dan Rasul-Nya sangat peduli kepada hambanya supaya terlindungi dari kedzaliman para pemimpin yang berhati kejam dan tidak mau bertanggung jawab. Pemerintahan yang berhati kejam dapat digolongkan sebagai sejahat-jahatnya pemerintahan, hadist Nabi SAW:

وَعَنْ عَائِدِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : يَا بُنَيَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
ص.م. يَقُولُ : إِنَّ شَرَّ الرُّعَاةِ الْحُطَمَةُ , فَأَيُّ بَيْتِكَ أَنْ لَا تَكُونَ مِنْهُمْ. (متفق عليه)

Artinya: “A’idz bin amru r.a. ketika memasuki rumah Ubaidillah bin Ziyad, ia berkata, hai anakku saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. ‘Sesungguhnya sejahat-jahatnya pemerintahan yaitu yang paling kejam, maka janganlah kau tergolong dari mereka.’” (H.R. Bukhori dan Muslim)

Pemimpin merupakan pelayan dan rakyat dapat dikatakan adalah sebagai tuan. Istilah itu juga tidak boleh hanya serta merta diartikan secara tekstual, melainkan maksud yang terkandung didalamnya. Bahwa agama islam melihat seorang pemimpin tidak boleh lebih tinggi statusnya dari pada rakyat, karena jika sekali lagi hakikat pemimpin adalah melayani kepentingan rakyat.

Jika seorang pemimpin bisa menjalankan tugas-tugasnya, maka kita sebagai rakyat juga harus bisa taat dan patuh kepada pemimpin yang terpilih itu, rakyat harus wajib mendengarkan dan mematuhi perintah pemimpinnya, jika selama yang diperintahkan itu tidak merupakan perbuatan maksiat atau merugikan rakyatnya.

4. Konsep Koordinasi

Seorang pemimpin disebuah organisasi harus bisa mengkoordinasikan setiap program kepada anggotanya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Dengan diberikannya informasi yang baik, serta pemberian tugas kepada setiap anggota oleh pemimpin maka masing-masing individu akan melaksanakan tugas sesuai dengan amanat yang diterima. Jika tidak ada koordinasi maka tugas yang diberikan kepada bawahan tujuan atau hasil perusahaan tidak akan tercapai.

Menurut Ndraha (2011:290) Ada dua cara pendekatan yang dapat digunakan dalam upaya memahami gejala pada koordinasi. Yang paling utama, yaitu pendekatan politik, normatif, atau birokratik. Ketiga pendekatan inilah yang sampai sekarang masih diikuti oleh pemerintah Indonesia. Pendekatan politik menjelaskan, koordinator sudah dipastikan dulunya atau sudah ditentukan terlebih dahulu bersama dengan bidang kerja yang lain. Aktivitas koordinator seperti itu yang disebut koordinasi. Yang kedua, yaitu disebut dengan pendekatan manajemen atau empiric. Pendekatan ini menjelaskan, koordinator yaitu suatu kepentingan dari masing-masing individu atau lembaga. Keperluan dari koordinasi akan membuat setiap orang atau lembaga untuk berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya.

Menurut Ndraha (2011:290-291) jika disangkut pautkan bersama dengan segi etimologi, maka koordinasi dapat dijelaskan yaitu berbagai pihak yang telah melakukan sesuatu yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order,*

not subordinate) yang mempunyai tujuan bersama untuk bertukar informasi dan bersama-sama menyepakatinya. Maka disatu metode pelaksanaan tugas dan kesuksesan dari pihak satu tidak akan mempengaruhi mekanisme pelaksanaan tugas dan kesuksesan dengan pihak yang lainnya. Kalau dilihat dari segi normative, koordinasi adalah suatu wewenang yang digunakan sebagai kendali, menyasikan, dan mengimbangkan suatu tindakan yang berbeda-beda. Agar segalanya dapat teratur dan terencana sesuai dengan yang diharapkan. Koordinasi sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan pembagian kerja.

Tujuan Koordinasi menurut Ndraha (2011:295) yang paling utama, yaitu membuat dan menjaga efektifitas koordinasi dengan sebaik-baiknya dengan cara penyelarasan antar berbagai aktivitas suatu lembaga. Kemudian yang kedua meminimalisasi berbagai permasalahan dan juga membuat efisiensi dengan sebaik-baiknya dari setiap kegiatan dengan cara menyepakati segala pihak yang ikut serta, dan yang ketiga membuat dan menjaga suasana dan saling responsive-antisipatif dikalangan lingkungan kerja yang tidak sama melalui komunikasi. Dibawah ini berbagai macam koordinasi:

1. Koordinasi waktu. Merupakan sebuah prosedur yang digunakan untuk memastikan, program mana yang dapat dijalankan secara bersama-sama, serta mana yang harus sesuai dengan urutan.
2. Koordinasi ruang dengan kata lain disebut sebagai koordinasi wilayah. Koordinasi ini dilakukan jika sebuah program atau kegiatan melalui berbagai daerah kerja.

3. Koordinasi interinstitusional, adalah koordinasi yang berkepentingan atas sesuatu proyek bersama dalam berbagai unit kerja.
4. Koordinasi fungsional, adalah kegiatan yang bersifat objektif dalam hubungan fungsional yang dilakukan oleh kelompok kerja.
5. Koordinasi structural, koordinasi ini bersifat murni dan dilakukan secara sukarela dengan kelompok kerja.
6. Koordinasi perencanaan, oleh James G. March dan Herbert A. Simon (1958) disebut *coordination by plan*, untuk mencegah terjadinya kehancuran suatu keberhasilan kelompok kerja.
7. Koordinasi masukan-balik, oleh March dan Simon disebut *coordination by feedback*, yaitu koordinasi hasil control terhadap setiap kegiatan unit kerja, agar dapat dilakukan *adjustment, improvement*, koreksi dan sebagainya.

Hasibuan (2006:85) menyampaikan pendapatnya Koordinasi merupakan suatu aktivitas untuk menepatkan bagian-bagian manajemen dan juga pekerjaan kepada bawahannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Koordinasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan secara optimal (Handoko 2003:195)

G.R Terry dalam Hasibuan (2006:85) koordinasi yaitu kegiatan yang disusun secara tertata dengan cara yang sesuai untuk menghasilkan kegiatan yang seimbang.

Berdasarkan definisi diatas berarti koordinasi memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Sense of cooperation*, rasa saling bermufakat , dilihat perbagian;
2. *Rivalry*, tidak jarang adanya kompetisi dalam suatu organisasi yang besar. dalam organisasi besar;

3. *Team spirit*, adanya rasa saling menghormati kepada rekan tim;
4. *Sprite de corps*, timbul rasa antusias jika saling menghormati;

Sifat-sifat koordinasi adalah:

1. Koordinasi adalah dinamis, bukan statis;
2. Koordinasi lebih focus pada pandangan keseruhan oleh seorang manager dalam menggapai tujuan yang diinginkan;
3. Koordinasi melihat seluruh kinerja.

Dalam buku G.R.Terry *Principle of Management* yang dikutip Handayani (2002:55) Koordinasi yaitu untuk menghasilkan jumlah dan waktu yang terarah maka dibutuhkan usaha yang sinkron. Setelah ditinjau kembali, koordinasi menurut Terry yaitu:

1. Adanya Perencanaan, perencanaan merupakan langkah dasar yang akan digunakan untuk mencapai sebuah tujuan;
2. Adanya Pengorganisasian, pengorganisasian merupakan penempatan orang-orang untuk ditempatkan sesuai dengan potensinya;
3. Adanya Penggerakan, merupakan faktor pendorong untuk pengambilan keputusan supaya berjalan dengan semestinya dan mencapai apa yang direncanakan;
4. Adanya Pengawasan, berguna untuk mengawasi jalannya lembaga.

Handayaniingrat (1989), menyebutkan bahwa Koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui indikator:

1. Komunikasi
 - a. Ada dan tidaknya informasi
 - b. Ada dan tidaknya alur informasi
 - c. Ada dan tidaknya teknologi informasi
2. Kesadaran tentang pentingnya koordinasi
 - a. Tingkat pengetahuan pelaksanaan terhadap koordinasi
 - b. Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi
3. Kompetensi dalam partisipan
 - a. Ada dan tidaknya pejabat berwenang yang terlibat
 - b. Ada dan tidaknya ahli pada bidang pembangunan yang terlibat didalamnya
4. Kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi
 - a. Ada dan tidaknya bentuk dari kesepakatan
 - b. Ada dan tidaknya pelaksana pada kegiatan
 - c. Ada dan tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan
 - d. Ada dan tidaknya insentif bagi pelaksana kesepakatan
5. Kontinuitas perencanaan
 - a. Ada dan tidaknya umpan balik dari obyek dan subjek pada pembangunan
 - b. Ada dan tidaknya perubahan pada hasil kesepakatan

Menurut E.F.L.Brech dalam Hasibuan (2007:85) berpendapat bahwa koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok yaitu pembagian kerja dengan masing-masing dan

menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri.

Dari pendapat Handyaningrat, G.R.Terry dan E.F.L.Brech dapat ditarik kesimpulan bahwa Indikator Koordinasi meliputi:

1. Perencanaan
 2. Pembagian Kerja
 3. Komunikasi
 4. Pengawasan
1. Perencanaan

Perencanaan disebut dengan kata lain yaitu *planning*, yang artinya hal yang sangat penting di dalam *management*.

Bintoro Tjokroaminoto (2004:90) menjelaskan perencanaan merupakan bentuk persiapan yang disusun dengan sangat baik demi mewujudkan suatu tujuan. Maka kesimpulannya perencanaan yaitu urutan kegiatan yang akan menjadi penentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2. Pembagian Kerja

Merupakan sebuah penjabaran yang merupakan suatu aktivitas untuk menentukan apakah dan sipakah yang melakukan pekerjaan tersebut.

Hasibuan (2007) Pembagian kerja adalah menjelaskan informasi tertulis untuk sebuah tugas dan tanggung jawab, situasi pekerjaan, hubungan pekerjaan serta aspek jabatan.

Rivai (2004) Pembagian kerja yaitu rangkaian sebuah analisis pekerjaan untuk mengolah informasi.

3. Komunikasi

Komunikasi yaitu sekumpulan orang yang menggunakan dan menciptakan informasi untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi bisa dilakukan secara lisan dan tertulis.

Komunikasi bisa dilakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain (Lydia Harliana Martono & Satya Joewana dalam buku Menangkal Narkoba dan Kekerasan:2008).

4. Pengawasan

Menurut Sukarna (2011:110) Pengawasan memiliki arti membimbing menertibkan, mengatur dan menguji kebenaran. Pengawasan menurut Fayol (dalam Sukarna, 2011:111) adalah pemeriksaan apakah suatu yang terjadi dengan apa yang telah direncanakan, intruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Menurut Siagian (2003:115) agar pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, dapat digunakan beberapa teknik pengawasan adalah:

- a. Teknik pengawasan langsung, yaitu jika lembaga melakukan pengawasan sendiri terhadap kegiatan yang sedang berjalan.
- b. Teknik pengawasan tidak langsung, adalah pengawasan yang didapat dari bawhan berupa laporan tertulis dan juga lisan.

Berdasarkan penjelasan diatas koordinasi merupakan seseorang yang melakukan tindakan terhadap bagian yang lain. Maka koordinasi dapat diartikan sebagai kecocokan antar anggota kerja yang lain supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan. Sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara optimal.

Jika didalam suatu lembaga melakukan Koordinasi dengan baik maka akan ada berbagai manfaat. Handoko (2003:197) menyampaikan pendapat bahwa manfaat dari Koordinasi yaitu:

- a. Dengan adanya koordinasi bisa menimbulkan rasa terikat antara satu dengan yang lainnya.
- b. Dapat menghindari suatu konflik antara organisasi dengan pejabat.
- c. Menghindari jika ada perbedaan pendapat antar anggota.
- d. Menghindari jikalau adanya pekerjaan yang kosong dalam suatu organisasi.
- e. Sesama pegawai harus saling membantu.

Hasibuan (2006:86) menyampaikan pendapat Koordinasi sangat penting dalam suatu organisasi, yaitu:

- a. Untuk mencegah adanya kesalahan, atau kekosongan dalam pekerjaan.

- b. Supaya orang dengan pekerjaannya sesuai untuk mencapai tujuan perusahaan.
- c. Memanfaatkan sarana dan prasarana guna mencapai tujuan yang diinginkan.
- d. Semua anggota manajemen saling membantu untuk menciptakan tujuan suatu organisasinya.
- e. agar segala tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada tujuan yang ingin dicapai.

Koordinasi yang efektif merupakan suatu tanggung jawab seorang pemimpin dalam mencapai administrasi atau pengelolaan yang baik, karena koordinasi dengan kepemimpinan yang baik akan terwujud sebuah koordinasi yang terarah.

Koordinasi pemerintah adalah program-program didalam penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki arah dan tujuan yang baik, yaitu untuk mencapai hal-hal besar serta pembangunan yang baik ditingkat pusat maupun daerah, maka harus ada pengendalian sehingga tujuan kegiatan tersebut dapat tercapai. Yang dimaksud pengendalian disini adalah kegiatan untuk menjamin kesesuaian karya dengan rencana, program, perintah-perintah, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang telah ditetapkan termasuk tindakan-tindakan korektif terhadap ketidakmampuan atau penyimpangan. Proses pengendalian menghasilkan data-data dan fakta-fakta baru yang terjadi dalam pelaksanaan, ini semua berguna bagi pimpinan perencanaan dan pelaksanaan. Apa yang telah direncanakan, diprogramkan tidak selalu cocok dengan kenyataan operasionalnya dalam rangka inilah pengendalian berguna sekali bagi perencanaan selanjutnya.

Koordinasi Kepala Desa dalam Pembangunan:

1. Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan.
3. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan.
4. Melaporkan pelaksanaan pembangunan dalam bentuk pertanggung jawaban.

5. Konsep Pembangunan

Proses pembangunan akan dialami oleh kehidupan masyarakat dalam ekonomi, sosial, budaya dan politik pada status makro dan mikro. Pentingnya pembangunan supaya dapat memperbaiki pertumbuhan agar lebih baik. (Nurman,2015:88-89).

Bidang pembangunan:

1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan di Lingkungan Desa.
 - Jalan pemukiman
 - Pembangkit listrik
 - Jalan desa
2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan pada sarana pendidikan dan kebudayaan.
 - Taman bacaan
 - Perpustakaan
 - Sanggar seni
3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan pada sarana dan prasarana kesehatan.
 - Posyandu

- Air bersih
4. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan pada sarana dan prasarana ekonomi;
 - Pasar desa
 - bumdes
 5. Pelestarian lingkungan hidup.

Menurut Randy R dan Rian Nugroho (2006) (dalam Nurman, 2015:136-137) menjelaskan bahwa faktor yang menentukan perencanaan pembangunan diantaranya adalah:

1. Pemahaman tentang teori perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan konsep-konsep ilmu politik, ilmu ekonomi, dan ilmu administrasi;
2. Pemahaman tentang cakupan wilayah perencanaan yaitu perencanaan nasional, perencanaan regional, perencanaan daerah atau perencanaan kawasan;
3. Perencanaan tentang bidang sektoral perencanaan yaitu bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial dan bidang keamanan;
4. Pemahaman tentang sumber/bentuk pembiayaan perencanaan yaitu mengandung visi nasional, mengandung misi departemen, mengandung misi daerah secara komprehensif, atau mengandung misi daerah secara sektoral;
5. Pemahaman tentang sumber/bentuk pembiayaan perencanaan, yaitu bersumber dari Negara-pusat, bersumber dari dari Negara-daerah, bersumber dari swasta, bersumber dari asing (uang atau hibah);

6. Pemahaman tentang penyelenggaraan perencanaan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swasta, masyarakat terorganisasi, atau masyarakat umum;
7. Pemahaman tentang bentuk rencana pembangunan, yaitu pembangunan, program, proyek, atau *crash program*.
8. Pemahaman tentang rencana pelaksanaan/implementasi perencanaan pembangunan, yaitu oleh departemen, oleh dinas provinsi, oleh kantor kabupaten/kota.
9. Pemahaman tentang instrument perencanaan: dokumen kampanye presiden, dokumen pembangunan jangka menengah nasional, dokumen pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis departemen, rencana strategis daerah, rencana kerja pemerintah, rencana kerja pemerintah daerah, rencana kerja lembaga, atau rencana lembaga daerah untuk 1 tahun;
10. Pemahaman tentang pengambilan keputusan strategis DPR, presiden, perwakilan kelompok negara/lembaga, menteri, DPRD, gubernur, kepala dinas provinsi, DPRD kabupaten/kota, bupati/walikota, kepala kantor bupati/walikota; dan
11. Pemahaman tentang tentang alur perencanaan: *top-down*, *bottom-up*, sinergi *top-down* dan *bottom up*.

Menurut Siagian (2012:4) (dalam Skripsi Rapiko, 2015:18) Pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara

terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara Bangsa menuju kemajuan dalam rangka pembinaan bangsa. Dari penjelasan Siagian tersebut dapat disimpulkan mengenai pembangunan antara lain:

- a. Pembangunan merupakan suatu proses yang bermakna rangkaian kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berharap yang bersifat indeviden dan tanpa akhir, hal ini dapat ditentukan berdasarkan jangka waktu, biaya, dan hasil yang diperoleh
- b. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu yang akan dilaksanakan.
- c. Pembangunan dilakukan secara terencana bermakna bahwa dalam perencanaan ada pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu dimasa depan.
- d. Rencana pembangunan mengandung makna perubahan dan pertumbuhan, ini berarti peningkatan kemampuan untuk berkembang dan harus bersikap proaktif dalam menghadapi
- e. Pembangunan mengarah pada modernitas bermakna bahwa cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.
- f. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan yang sifatnya multidimensional yang mencakup seluruh segi kehidupan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.I. Penelitian Terdahulu

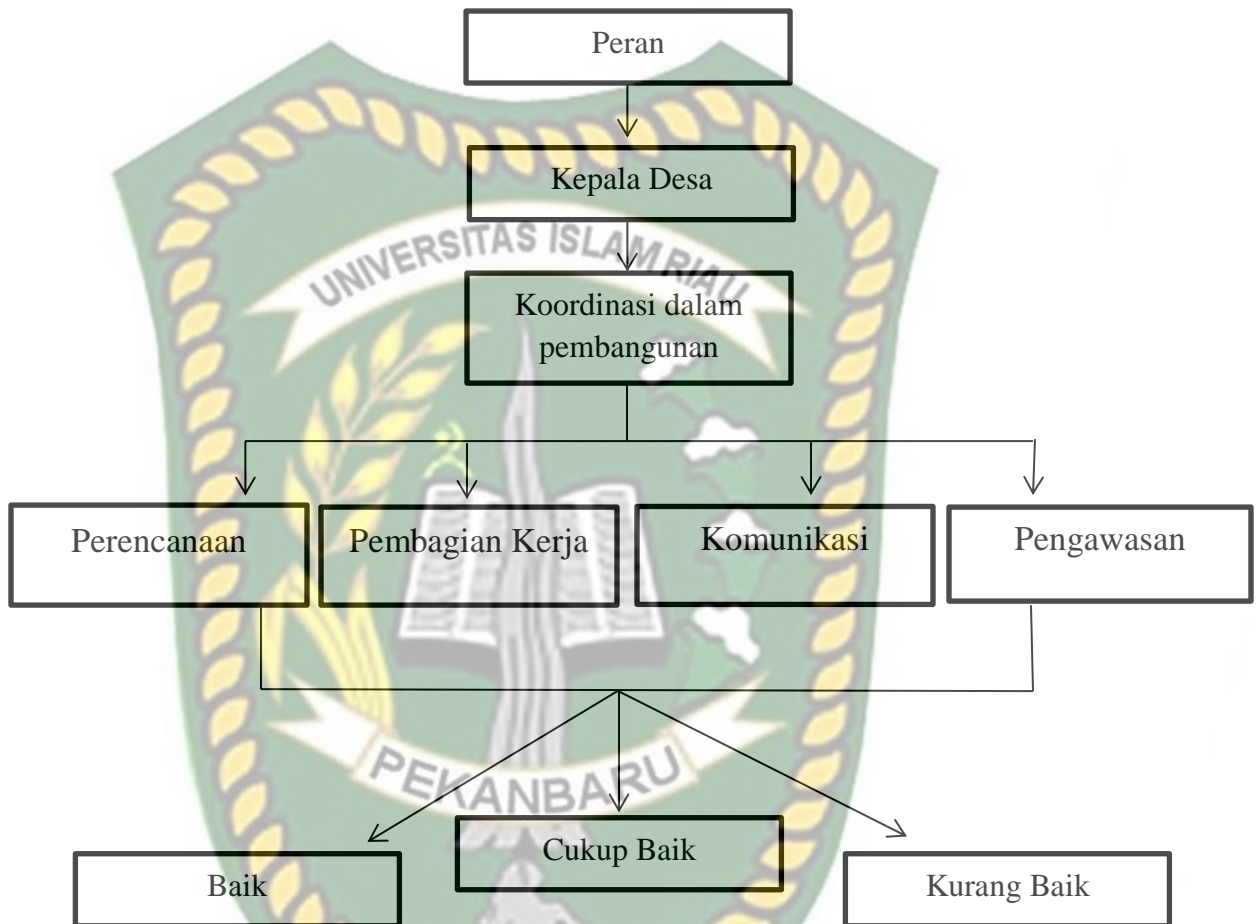
| No | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Vieke V. Pelleng | Koordinasi Pemerintahan Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan | Meneliti tentang koordinasi pembangunan secara partisipatif | Fenomena: 1. Masih adanya fasilitas umum yang belum terpenuhi. 2. Belum adanya sarana air bersih (PDAM), penerangan jalan, prasarana jalan yang masih berbatu belum diaspal. |
| 2. | Dendi Haryadi, 2018 | Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir (Studi Kasus Pembangunan Pelatar di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan 2015) | Meneliti tentang pembangunan secara fisik | Fenomena: 1. Pembangunan pelantar masih belum maksimal dan terkesan lambat, peran kepala desa sampai saat ini dirasakan masih kurang optimal. 2. Kurangnya koordinasi kepala desa dalam meningkatkan dan menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan baik itu pada proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan |

| | | | | |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | maupun evaluasi hasil pembangunan. |
| 3. | Fitanisari Jorebe | Efektivitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Koordinasi Pembangunan Secara Partisipatif di Desa Togawa Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara | Meneliti tentang koordinasi pembangunan secara partisipatif | <p>Fenomena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya program pembangunan yang dinilai oleh masyarakat tidak sepenuhnya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa umumnya. 2. Adanya program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat tidak saling menunjang satu dengan umumnya. 3. Adanya program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat tidak saling menunjang |

C. Kerangka Pikiran

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 mengatakan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan Pasal 26 ayat 2, salah satu wewenang Kepala Desa adalah Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Berdasarkan pada pasal 78 ayat (1) pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Selanjutnya koordinasi pembangunan desa meliputi tahap perencanaan pembangunan, Pembagian Kerja, Komunikasi, dan Komunikasi.

Gambar II.II Kerangka Pikir peran kepala desa dalam Mengkoordinasi Pembangunan Fisik di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (Tahun 2017)



Sumber: Modifikasi Penulis 2018

D. Konsep Operasional

Didalam penelitian ini penulis akan memberikan beberapa penelitian dan faktor penelitian yang akan dioperasionalkan dengan indikator dibawah sebagai berikut:

- a. Peranan adalah suatu upaya atau kemampuan maupun perilaku dari pemerintah yang menduduki jabatan pemerintahan desa agar dapat menggerakkan dan membimbing serta menumbuhkan rasa kesadaran dan partisipasi masyarakat desa untuk mencapai tujuan yakni tumbuh dan kembang mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.
- b. Pembangunan desa adalah suatu proses perubahan dan perbaikan yang dilaksanakan sudah terencana dan terarah dari suatu keadaan yang kurang baik menuju yang lebih baik.
- c. Peranan pemerintahan Desa dalam pembangunan desa adalah usaha-usaha dan upaya-upaya yang dilakukan oleh perangkat pada organisasi Pemerintahan Desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa melalui pertumbuhan, perubahan dari segala aspek kehidupan masyarakat desa.
- d. Koordinasi merupakan cara untuk menyatukan bagian yang berbeda, untuk dapat menyelesaikan suatu kegiatan dibutuhkan usaha yang maksimal, supaya memperoleh keseluruhan hasil yang diinginkan.

E. Operasional Variabel

Tabel II.II : Konsep Operasional Variabel dalam Penelitian mengenai Peran Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Fisik Di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (Tahun 2018)

| Konsep | Variabel | Indikator | Item Penilaian | Skala Ukur |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron atau teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasarannya yang telah ditentukan. Handayaniingrat (2002:55)</p> | <p>Peran kepala desa dalam mengkoordinasi pembangunan desa</p> | 1.Perencanaan | <p>a.menyusun rencana pembangunan</p> <p>b.musyawarah rencana pembangunan</p> | <p>Baik</p> <p>Cukup baik</p> <p>Kurang baik</p> |
| | | 2.Pembagian Kerja | <p>a.Kebijakan</p> <p>b.Strategi</p> | <p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang baik</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | 3.Komunikasi | a. Komunikasi langsung b. Komunikasi tertulis atau tidak langsung | Baik Cukup Baik Kurang Baik |
| | | 4.Pengawasan | a.Peran Kepala desa dalam mengawasi pembangunan b.Pengawasan masyarakat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan | Baik Cukup Baik Kurang Baik |

Sumber: Modifikasi Penulis 2018

F.Teknik Pengukuran

Didalam mengetahui peran Kepala Desa sebagai Perencanaan, Pembagian Kerja, Komunikasi dan Pengawasan dalam mengkoordinasi pembangunan fisik Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (Tahun 2018), ditetapkanlah bentuk pengukuran baik itu pada pengukuran variabel maupun indikator dengan data persentase.

Untuk pengukuran dalam variable peran kepala desa dalam mengkoordinasi pembangunan fisik di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (Tahun 2018), ditetapkanlah ukuran sebagai berikut:

Baik : Apabila persentase variabel (table rekapitulasi) berada pada kisaran $\geq 67\%$

Cukup Baik : Apabila persentase variabel (table rekapitulasi) berada pada kisaran 34%-66%

Kurang Baik : Apabila persentase variabel (table rekapitulasi) berada pada kisaran penilaian $\leq 33\%$

Untuk pengukuran indikator peran Kepala Desa dalam mengkoordinasi pembangunan fisik di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Baik : Apabila persentase variabel (table rekapitulasi) berada pada kisaran $\geq 67\%$

Cukup Baik : Apabila persentase variabel (table rekapitulasi) berada pada kisaran 34%-66%

Kurang Baik : Apabila persentase variabel (table rekapitulasi) berada pada kisaran penilaian $\leq 33\%$

2. Pembagian Kerja

Baik : Apabila persentase variabel (table rekapitulasi) berada pada kisaran $\geq 67\%$

Cukup Baik : Apabila persentase variabel (table rekapitulasi) berada pada kisaran 34%-66%

Kurang Baik : Apabila persentase variabel (table rekapitulasi) berada pada kisaran penilaian $\leq 33\%$

3. Komunikasi

Baik : Apabila persentase variabel (table rekapitulasi) berada pada kisaran $\geq 67\%$

Cukup Baik : Apabila persentase variabel (table rekapitulasi) berada pada kisaran 34%-66%

Kurang Baik : Apabila persentase variabel (table rekapitulasi) berada pada kisaran penilaian $\leq 33\%$

4. Pengawasan

Baik : Apabila persentase variabel (table rekapitulasi) berada pada kisaran $\geq 67\%$

Cukup Baik : Apabila persentase variabel (table rekapitulasi) berada pada kisaran 34%-66%

Kurang Baik : Apabila persentase variabel (table rekapitulasi) berada pada kisaran penilaian $\leq 33\%$

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kuantitatif sehingga fakta yang terjadi di lapangan dapat dijelaskan sebagaimana mestinya, penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menjadi teori sebagai bingkai kerja dari keseluruhan penelitian. Dengan pertimbangan untuk mempermudah penulisan dalam melakukan penelitian ini. Maka penulis menggunakan tiore penelitian survey deskriptif dengan koesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai alat untuk mengumpulkan data.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini diadakan di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dengan alasan lokasi karena ingin melihat sejauh mana Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan di Desa.

C. Populasi dan Sampel

A. Populasi

Keseluruhan dari objek yang dijadikan sumber penelitian. Populasi merupakan keseluruhan dari semua jenis objek yang memiliki karakteristik tertentu,

jelas dan lengkap yang akan diteliti (bahan peneitian). Pada penelitian ini adalah peranan Kepala Desa Dalam Melaksanakan Urusan Pembangunan di Desa sedangkan masyarakat menjadi pedoman.

B. Sampel

Sampel merupakan orang yang diambil atau dijadikan sumber penelitian atau sampel penelitian untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian. Untuk lebih jelasnya penemuan sampel yang diambil dari setiap populasi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III.1 Jumlah populasi dan sampel penelitian peran Kepala Desa didesa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

| No | Jenis Populasi | Populasi | Sampel | Presentase(%) |
|----|------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| 1 | Kepala desa | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Sekretaris desa | 1 | 1 | 100% |
| 3 | Kepala urusan umum dan perencanaan | 1 | 1 | 100% |
| 4 | Ketua LPM | 1 | 1 | 100% |
| 6 | Ketua BPD | 1 | 1 | 100% |
| 7 | Masyarakat | 2351 | 100 | 4,45% |
| | Jumlah | 2356 | 105 | |

Sumber: Modifikasi Penulis 2018

D. Teknik penarikan sampel

Dalam penelitian kuantitatif adalah kata-kata dan tindakan, selain itu adalah data tambahan seperti dokumen lainnya.

Berdasarkan pengertian diatas maka yang termasuk sebagai sumber data dapat berupa seseorang, peristiwa dan dokumen yang dapat dijadikan sumber informasi dan dapat memberikan data maupun informasi yang diperlukan sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan yaitu: Peran Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Fisik Di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (Tahun 2018).

E. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh penelitian secara langsung dari sumbernya dan narasumber sebagai informasi yang langsung berhubungan dengan focus penelitian yang berupa kata-kata atau tindakan dari orang yang diamati atau diwawancarai oleh informan yang sudah ditentukan, seperti: Kepala Desa, Sekretaris desa, Kepala urusan umum dan perencanaan, Kepala dusun, Ketua BPD, Ketua RT, dan RW.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang merupakan data yang bersumber dari luar kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau tidak diamati, jadi data sekunder data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen, data ini yaitu data pendukung dalam penelitian ini, data tersebut antara lain, Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK), jumlah penduduk, jenis agama, tingkat pendidikan, dan biografi desa.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara menurut Riduwa (2009:29) Wawancara yaitu suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya dalam penelitian ini penulis melakukan Tanya jawab kepada pihak-pihak terkait, dengan alasan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumtan Kabupaten Pelalawan

Dengan kata lain, Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara (*interview*) dengan cara mengajukan angket pertanyaan yang ditunjukkan pada sampel penelitian

2. Kuesioner

Kuesioner menurut Usman (2009:57) Kuesioner yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada responden baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini lembarab pertanyaan disebarakan kepada Ketua RW, RT, tokoh masyarakat dan kepala Keluarga. Dengan alasan karena jumlahnya yang besar dan tidak bisa dilakukan wawancara secara langsung secara satu persatu

Jadi, Kuesioner yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada responden mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

3. Observasi

Husaini Usman (2009:52), teknik observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan teratur terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan cara pendekatan dan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data-data dari awal dan data skunder dari Kantor Kepala Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Dengan alasan berguna untuk mengetahui situasi dari daerah penelitian.

Jadi, Observasi yaitu pengambilan data dengan cara penghambat langsung ketempat kegiatan atau ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan ditempat penelitian.

4. Dokumentasi

Riduwan (2009:31) teknik dokumentasi yaitu ditujukan guna memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relava, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan penelitian. Tekni ini biasa digunakan untuk mendapatkan konsep teori penelitian.

Jadi, Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengandalkan pencatatan atau pengambilan alih dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi seperti monografi desa dan lain-lain.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Arikanto (2006:235) Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah data terkumpul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik penganalisaan secara deskriptif, setelah data dikumpulkan secara lengkap menyeluruh, maka data tersebut dapat dikelompokan dan sesuai dengan jenis data yang diperoleh, data yang bersifat kualitatif akan diuraikan secara lengkap dan rinci dalam bentuk kalimat, sedangkan data kuantitatif akan ditabulasikan dalam bentuk tabel, barulah kemudian membandingkan dengan teori atau pendapat para ahli untuk membandingkan.

H. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.II Jadwal dan waktu kegiatan penelitian tentang peranan kepala desa dalam melaksanakan urusan pembangunan didesa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

| No | Jenis Kegiatan | Bulan dan Minggu Ke- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|----------------------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|-------|---|---|---|
| | | Sept-Okt | | | | Nov-Des | | | | Januari | | | | Februari | | | | Maret | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Penyusunan UP | x | x | x | X | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seminar UP | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Perbaikan hasil seminar | | | | | | | x | X | x | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penelitian lapangan | | | | | | | | | | x | X | X | | | | | | | | |
| 5 | Pengelolaan data | | | | | | | | | | | | | x | X | X | | | | | |
| 6 | Bimbingan skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | |
| 7 | Ujian skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| 8 | Revisi dan pengesahan skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| 9 | Penyerahan skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |

Sumber: Modifikasi Penulis 2018

I. Sistematika Laporan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari beberapa sub-sub bagian yaitu sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan yang Meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- BAB II : Studi Kepustakaan dan Kerangka Pikir Yang Meliputi Studi

Kepustakaan, Kerangka Pikir, Konsep Operasional, Operasional Variabel, dan Teknik Pengukuran.

- BAB III : Metode penelitian yang meliputi Tipe Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Penarikan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis, Data, Jadwal Waktu kegiatan Penelitian, dan Sistematika Laporan Penelitian.
- BAB IV : Deskripsi Lokasi Penelitian yang Meliputi Keadaan Geografis, Keadaan Penduduk, Keadaan Sosial, dan Keadaan Pemerintahan.
- BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang Meliputi Identitas Responden, Peran Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Fisik Di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (Tahun 2018).
- BAB VI : Penutupan yang meliputi Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan hasil penelitian dari masing-masing indikator yang penulis gunakan dalam penelitian ini, sedangkan saran yaitu masukan-masukan yang penulis tujukan kepada responden khususnya responden dari aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan koordinasi pembangunan fisik.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Pematang Tinggi

Desa Pematang Tinggi adalah salah satu desa ekstrasmigrasi yang berada di wilayah kecamatan Kerumutan. Sebelum menjadi desa definitif pada tahun 1993 desa Pematang Tinggi merupakan satuan pemukiman IV atau yang biasa disingkat dengan SP IV (Empat). Tidak lama kemudian satuan pemukiman ini diganti dengan nama Tegal Sari, namun seiring berjalannya waktu nama Tegal Sari dianggap sebagian masyarakat atau penduduk pribumi yang merupakan penduduk melayu, nama tegal sari dianggap terlalu berbau bahasa jawa sehingga kurang pas dengan keadaan masyarakat pada saat itu dan dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan perpecahan terutama dengan penduduk asli.

Sebelum ada kesepakatan nama Pematang Tinggi, sebenarnya ada beberapa pilihan nama yang diusulkan oleh tokoh masyarakat melayu pada saat itu yaitu : Pematang Tinggi, Lubuk Sibungkuk, dan Seminai Ngampak. Setelah melalui pembahasan yang panjang nama Pematang Tinggilah yang kemudian dipilih untuk menggantikan nama Tegal Sari karena dianggap lebih sesuai dengan kondisi geologis desa.

Pada masa awal transmigrasi sampai terbentuk desa definitif yang mandiri, Kepala Satuan Pemukiman merupakan pembina dalam penempatan peserta transmigrasi, sementara untuk urusan administrasi pemerintahan dibawah komando PJS Kepala Desa.

Pada tahun 1986 penduduk desa Pematang Tinggi adalah 517 KK yang merupakan penduduk awal desa (sebagai peserta transmigrasi), luas wilayah yang disediakan oleh Pemerintah adalah 1.292,5 ha. Dan merupakan luas wilayah yang dimiliki oleh desa Pematang Tinggi hingga saat ini. Sedangkan jumlah penduduk saat ini adalah 711 KK terdiri dari 2.351 jiwa.

Selama kurun waktu kurang lebih 29 tahun perjalanan Pemerintah Desa dari tahun 1989 sampai dengan 2018, telah terjadi perubahan estafet kepemimpinan dimulai Kepala Satuan Pemukiman, PJS Kepala Desa sampai Kepala Desa Definitif. Beberapa tokoh yang pernah memimpin Pematang Tinggi diantaranya sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tahun 1989 s/d 1993 | : Bapak As'ad selaku Kepala Satuan Pemukiman (SP) IV |
| Tahun 1993 s/d 1997 | : Bapak Amril Selaku Kepala Satuan Pemukiman (SP) IV |
| Tahun 1989 s/d 1992 | : Bapak Sulhono selaku PJS. Kepala Desa dan Bapak Suratman sebagai Sekdes |
| Tahun 1992 s/d 1994 | : Bapak Ruslani selaku PJS. Kepala Desa dan Bapak Suratman sebagai Sekdes |

- Tahun 1994 s/d 2000 : Bapak Suratman PJS. Kepala Desa
- Tahun 2000 s/d 2009 : Bapak Sulhono selaku Kepala Desa dan Bapak Suratman sebagai Sekdes
- Tahun 2009 s/d 2015 : Bapak Suwandi, ST selaku Kepala Desa dan Bapak Warsito, AMd sebagai Sekdes
- Tahun 2015 s/d sekarang : Bapak Andi Agus Susiawan, ST selaku Kepala Desa dan Bapak Khanan selaku Sekdes

Tabel IV.I Tabel tokoh yang pernah menjabat sebaga Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

| NO | NAMA | JABATAN | TAHUN |
|-----|---------------------|-------------------|-----------------|
| 1. | Suyadi NR | Kaur Kesra | 1995 – 1997 |
| 2. | Baroto | Kaur Kesra | 1997 – 2001 |
| 3. | Sugiyanto | Kaur Pembangunan | 2001 – 2003 |
| 4. | H. Sumarno | Kaur Pemerintahan | 2001 – 2014 |
| 5. | Saliyanto | Kaur Kesra | 2001 – 2011 |
| 6. | Khanan | Kaur Pembangunan | 2003 – 2015 |
| 7. | Bambang Siswanto | Bendahara | 2001 – 2012 |
| 8. | Abdul Rohman, S.H.I | Kaur Kesra | 2011 – sekarang |
| 9. | Ida Marfiana, SE | Bendahara | 2012 – sekarang |
| 10. | Bambang Siswanto | Kaur Pembangunan | 2015 – sekarang |
| 11. | Ari Miranto | Kaur Pemerintahan | 2014 – sekarang |
| 12. | Wiyati Efi P, S.Si | Kaur Umum | 2014 – 2015 |

Layaknya dengan Desa lain bahwa Desa Pematang Tinggi memiliki batas-batas wilayah pemerintahan, yaitu :

Sebelah Utara : Kelurahan Kerumutan

Sebelah Selatan : Kelurahan Kerumutan

Sebelah Barat : Kelurahan Kerumutan

Sebelah Timur : Desa Beringin Makmur

a) Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman : 318 ha
2. Pertanian/Perkebunan : 1034 ha
3. Tanah Kas Desa : 11 ha
4. Hutan : 0 ha
5. Rawa-rawa : 0 ha
6. Perkantoran/FU : 6 ha
7. Sekolah : 6 ha
8. Jalan : 80 km
9. Lapangan sepak bola : 2 ha

b) Orbitasi

- a. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 15 km
- b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 30 Menit
- c. Jarak ke ibu kota kabupaten : 95 km
- d. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 2,5 Jam

B. Keadaan Penduduk

Menurut Dr.Kartomo Penduduk adalah sejumlah orang yang mendiami suatu daerah tertentu. Apabila di daerah didiami oleh banyak orang dan menetap disana, maka itu bisa diartikan sebagai penduduk terlepas warga Negara atau pun bukan.

Penduduk merupakan modal dasar dan faktor utama dalam pembangunan karena penduduk merupakan objek sekaligus subjek dari pembangunan itu sendiri sehingga penduduk penting diketahui seperti halnya di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan data yang diperoleh dilokasi penelitian adapun jumlah penduduk di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan adalah 2,351 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1,180 jiwa yang terdiri dari perempuan 1,171 jiwa, dengan 711 Kepala Keluarga (KK).

Table IV.II: Jumlah penduduk dirinci menurut jenis kelamin dan jumlah KK di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

| No | Desa | Jenis Kelamin | | Jumlah KK | Jumlah |
|----|-----------------|---------------|-----------|-----------|--------|
| | | Laki-laki | Perempuan | | |
| 1 | Pematang Tinggi | 1180 | 1171 | 711 | 2351 |

Sumber: Kantor Desa Pematang Tinggi

C. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Untuk mengetahui keadaan sosial dan Ekonomi Desa Pematang Tinggi berikut ini akan dipaparkan mengenai Mata Pencaharian, Tingkat Pendidikan dan Sarana Pendidikan.

1) Mata Pencaharian

Untuk mengetahui keadaan jumlah penduduk jika dikelompokkan menurut pekerjaan/ mata pencaharian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.III Keadaan Penduduk Desa Pematang Tinggi berdasarkan Mata Pencaharian

| No | Mata Pencarian | Jumlah | Persentase |
|----|----------------|--------|------------|
| 1 | Petani sawit | 589 | 53,30 % |
| 2 | Pedagang | 55 | 4,97 % |
| 3 | PNS | 36 | 3,25 % |
| 4 | Tukang | 50 | 4,52 % |
| 5 | Guru | 80 | 7,23 % |
| 6 | Bidan/Perawat | 12 | 1,08 % |
| 7 | TNI/Polri | 5 | 0,45 % |
| 8 | Buruh | 150 | 13,57 % |
| 9 | Jasa Persewaan | 96 | 8,68 % |
| 10 | Swasta | 32 | 2,89 % |
| | Jumlah | 1.105 | 100 % |

Sumber : Kantor Desa Pematang Tinggi 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat Keadaan Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian Desa Pematang Tinggi pekerjaan masyarakat sebagai petani sawit sebanyak 589 orang dengan persentase 53,30%, selanjutnya pedagang sebanyak 55 orang dengan persentase 4,97%, jenis pekerjaan sebagai PNS sebanyak 36 orang dengan persentase 3,25%, pekerjaan sebagai tukang 50 orang dengan persentase

4,52%, jenis pekerjaan sebagai TNI/Polri 5 orang dengan persentase 0,45%, jenis pekerjaan sebagai buruh sebanyak 150 orang dengan persentase 13,57%, jenis pekerjaan sebagai jasa persewaan sebanyak 96 orang dengan persentase 8,68% dan pekerjaan sebagai swasta sebanyak 32 orang dengan persentase 2,89%. Maka dapat terlihat bahwa jenis pekerjaan masyarakat yang terbanyak adalah pekerjaan sebagai petani sawit.

2) Tingkat Pendidikan

Dari pemerataan pembangunan pendidikan dan untuk meningkatkan tingkat pemahaman masyarakat dalam menyikapi kondisi perkembangan informasi yang kian meningkat, masyarakat Desa Pematang Tinggi memiliki tingkat pendidikan yang heterogen. Hal ini menyebabkan tingkat analisis masyarakat terhadap sistem pemerintahan juga berbeda. Oleh sebab itu dibawah ini akan dipaparkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Pematang Tinggi yang dituangkan pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.IV Tingkat Pendidikan Masyarakat

| NO | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|----|--------------------|--------|------------|
| 1 | SD/MI | 721 | 43,56% |
| 2 | SLTP/MTs | 341 | 20,60% |
| 3 | SLTA/MA | 320 | 19,33% |
| 4 | MAHASISWA/I | 32 | 1,93% |
| 5 | S1/Diploma | 119 | 7,19% |
| 6 | TK/Paud | 122 | 7,37% |
| | Jumlah | 1.655 | 100 % |

Sumber : Kantor Desa Pematang Tinggi 2018

Pada tabel diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Pematang Tinggi yang berada dijenjang TK/Paud sebanyak 122 orang dengan persentase 7,37%, kemudian Sekolah Dasar (SD) sebanyak 721 orang dengan presentase 43,56%, selanjutnya berada dijenjang SLTP/MTs sebanyak 341 orang dengan persentase 20,60%, yang berada dijenjang SLTA/MA sebanyak 320 orang dengan persentase 19,33%, MAHASISWA/I sebanyak 32 orang dengan persentase 1,93%, dan masyarakat yang tamatan S1/Diploma sebanyak 119 orang dengan persentase 7,19. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak-anak masyarakat Desa Pematang Tinggi masih bersekolah dasar.

3) Jenis Pendidikan

Setelah dipaparkan tentang jumlah penduduk yang dilihat dari tingkat pendidikan tersebut selayaknya data tentang sarana dan prasana berupa gedung sekolah sangatlah mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat. Oleh sebab itu dibawah ini jenis sarana pendidikan di Desa Pematang Tinggi :

Tabel IV.V Jenis sarana pendidikan di Desa Pematang Tinggi

| No | Jenis Sarana Pendidikan | Jumlah |
|----|-------------------------|--------|
| 1 | Gedung TK/Paud | 3 |
| 2 | Gedung SD/MI | 2 |
| 3 | SLTP/MTs | 1 |
| 4 | SLTA/MA/SMK | 0 |
| 5 | Madrasah | 3 |
| | Jumlah | 9 |

Sumber : Kantor Desa Pematang Tinggi 2018

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah sarana pendidikan TK/Paud sebanyak 3 unit, selanjutnya jumlah SD/MI sebanyak 2 unit, kemudian SLTP/MTs 1 unit, sedangkan gedung SLTA/MA/SMK tidak ada di Desa Pematang Tinggi, dan gedung Madrasah sebanyak 3 unit. Maka dapat disimpulkan jumlah sarana pendidikan di Desa Pematang Tinggi dinilai kurang memadai untuk memberikan pelayanan bagi generasi penerus muda di Desa ini.

4) Agama

Jenis agama yang dianut masyarakat di Desa Pematang Tinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.VI: Keadaan Agama Masyarakat Desa Pematang Tinggi

| No | Agama | Jumlah | Peersentase |
|----|-------------------|--------|-------------|
| 1 | Islam | 2301 | 97,87% |
| 2 | Kristen Protestan | 13 | 0,55% |
| 3 | Kristen Katolik | 37 | 1,57% |
| 4 | Hindu | 0 | 0% |
| 5 | Budha | 0 | 0% |
| | Jumlah | 2351 | 100% |

Sumber: Kantor Desa Pematang Tinggi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa agama yang dianut masyarakat di Desa Pematang Tinggi yaitu Agama Islam 2301 orang dengan persentase 97,87%, selanjutnya Agama Kristen Protestan sebanyak 13 orang dengan presentase 0,55%, kemudian Agama Kristen Katholik sebanyak 37 orang dengan presentase 1,57%, dan Agama Hindu dan Budha tidak ada dengan jumlah 0 orang dengan presentase 0%. Dari data diatas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Pematang Tinggi mayoritas menganut Agama Islam.

D. Gambaran umum pemerintahan Desa Pematang Tinggi

Wilayah pemerintahan Desa Pematang Tinggi terbagi dalam 3 dusun, 10 RW, 18 RT. Unsur pemerintahan Desa Pematang Tinggi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan-undang yang berlaku terdiri dari Aparat Pemerintahan Desa dan BPD.

Kepala Desa Pematang Tinggi dipilih oleh masyarakat Desa Pematang Tinggi melalui pemilihan langsung yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh aparat desa dari unsur : Sekretaris Desa, Kepala Dusun, yang keseluruhannya berjumlah 10 orang.

Tabel IV.VII Aparat Pemerintahan Desa Pematang Tinggi

| No | Nama | Jabatan |
|----|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1 | Andi Agus Susiawan, ST | Kepala Desa |
| 2 | Khanan | Sekretaris Desa |
| 3 | Abdul Rahman, S.H.I | Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan |
| 4 | Ari Miranto | Kepala urusan umum dan perencanaan |
| 5 | Edi Syafutra, S.Pd | Kepala seksi pemerintahan |
| 6 | Dlholik Achmad Flirdaus, SE | Kepala seksi keuangan |
| 7 | Ida Marfiana, SE | Bendahara |
| 8 | Sapta Nugraha | Kepala Dusun I Palma Sari |
| 9 | Bambang Siswanto | Kepala Dusun II Sawit Mukti |
| 10 | Akhmad Sahit Mubasir, S.IP | Kepala Dusun III Sido Mulyo |

Sumber : Kantor Desa Pematang Tinggi 2018

Dengan dibantu oleh perangkat Desa tersebut, Kepala Desa menjalankan tugas-tugasnya yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

E. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Desa Pematang Tinggi

1. Kepala Desa

Tugas dan fungsi Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selanjutnya Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya keakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa,
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Desa

Tugas dan fungsi sekretaris desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam Pasal 7 adalah Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris desa. Sekretaris desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Selanjutnya Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasaranan perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan penyediaan umum;
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;

- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Kaur Pemerintahan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa. Kaur pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan. Kaur pemerintahan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang pemerintahan. Untuk melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan desa;
2. Menyusun rencana regulasi desa;
3. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
4. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
5. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat desa;
6. Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
7. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah desa;
8. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan profil desa;
9. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Kaur Umum dan Perencanaan (Kaur Pembangunan)

Fungsi Kepala Urusan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam Pasal 8 Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala Urusan

bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi:

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan desa lainnya.
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa. Kaur urusan Perencanaan bertugas membantu kepala desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas-tuganya mempunyai fungsi:

1. Mengkoordinasi urusan perencanaan;

2. Menyusun RAPBDes;
3. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan desa;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi program pemerintahan desa;
5. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes);
6. Menyusun laporan kegiatan desa;
7. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Dusun (Kadus)

Fungsi Kepala Dusun menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam Pasal 10 memiliki fungsi:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

6. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 32 mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati

Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut:

Tugas Badan Permusyawaratan Desa:

1. Menggali aspirasi masyarakat;
2. Menampung aspirasi masyarakat;
3. Mengelola aspirasi masyarakat;
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. Menyelenggarakan musyawarah desa;
7. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu;
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dalam BAB III Pasal 9 Tugas dan Fungsi LPM adalah:

1. Penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;

2. Penanam dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
4. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya, gotong royong masyarakat; dan
6. Penggali pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

8. Kaur Keuangan

Menurut Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, kaur keuangan mempunyai tugas:

1. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APB Desa;
2. Menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seizing kepala desa, membukukan dan mempertanggung jawabkan keuangan desa;
3. Mengendalikan pelaksanaan APBDes;
4. Mengelola dan membina administrasi keuangan desa;
5. Menggali sumber pendapatan desa;
6. Melakukan tugas-tugas kedinasan diluar urusan keuangan yang diberikan oleh kepala desa atau sekertaris desa; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

9. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa. Kepala Kasi kesejahteraan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang kesejahteraan. Untuk melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang sosial budaya;
2. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang ekonomi;
3. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang politik;
4. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang lingkungan hidup;
5. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang keluarga;
6. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang pemuda;
7. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang pemuda, olah raga dan karang taruna;
8. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kasi pelayanan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang pelayanan. Untuk melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

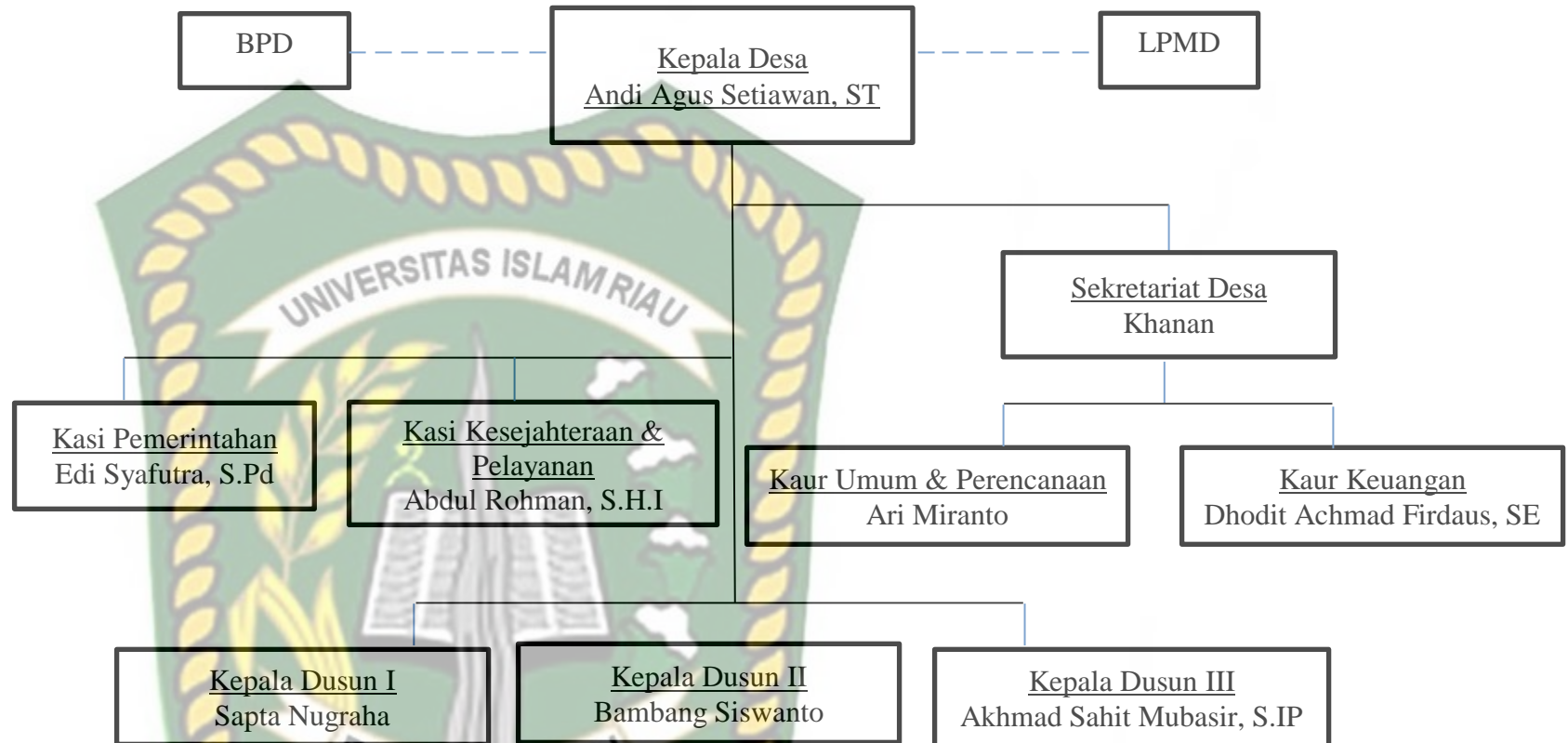
1. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi tahap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa;
2. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa;

3. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat desa;
4. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagaerjaan masyarakat desa;
5. Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, dan rujuk;
6. Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;
7. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
8. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
9. Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan.



1. Struktur Organisasi Desa Pematang Tinggi

Gambar IV.I: Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Pematang Tinggi



Sumber: Kantor Desa Pematang Tinggi 2018

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Identitas responden merupakan keterangan yang diperoleh dari responden berupa kuisioner yang disebarkan oleh penulis yang berisikan responden dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum & Perencanaan, Ketua LPM, Ketua BPD dan Masyarakat Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam keterangan dibawah ini:

1. Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin juga mempengaruhi tingkah laku dan sikap seseorang dalam menghadapi ataupun menganalisa suatu masalah. Jenis kelamin responden dalam penelitian ini terdiri atas jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan, untuk melihat lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.I: Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|----|---------------|--------|------------|
| 1 | Laki-laki | 16 | 53,3 % |
| 2 | Perempuan | 14 | 46,6 % |
| | | 30 | 100 % |

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2018

Dari tabel diatas terlihat bahwa jenis kelamin laki-laki berjumlah 16 orang atau 53,3% dan jenis kelamin perempuan sejumlah 14 orang atau 46,6%. Dapat

dilihat bahwa dalam penelitian ini jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan jenis kelamin perempuan karena responden laki-laki pada penelitian ini adalah masyarakat yang ikut langsung dalam mengkoordinasi pembangunan.

2. Tingkat Usia Responden

Usia memberikan isyarat terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa dengan baik. Usia muda akan mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan maksimal disbanding yang usia lebih tua, terkadang terkendala dengan umur yang sudah lanjut. Hal lain juga dipengaruhi oleh ketahanan fisik. Responden yang masih tergolong usia muda yaitu kurang dari 45 tahun dianggap mampu menjalankan tugasnya dengan baik serta mampu memberikan pengaruhnya dalam bentuk peranan sebagai Perencanaan, Pembagian kerja, Komunikasi dan Pengawasan dalam mengkoordinasi pembangunan di Desa. Sedangkan responden yang masih tergolong usia tua yaitu 45 tahun keatas akan mendapat kesulitan untuk melaksanakan tugasnya dan juga dalam proses mengkoordinasi pembangunan di desa. Untuk lebih jelasnya pada tabel dibawah ini:

Tabel V.II: Tingkat Usia Responden

| No | Usia | Responden | Presentase |
|--------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 26-30 | 5 | 16,6 % |
| 2 | 31-35 | 10 | 33,3 % |
| 3 | 36-40 | 7 | 23,3 % |
| 4 | 41-45 | 5 | 16,6 % |
| 5 | 46-50 | 3 | 10 % |
| 6 | 51 keatas | - | % |
| Jumlah | | 30 | 100 % |

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2018

Dari tabel diatas dalam pengelompokan identitas responden berdasarkan tingkat usia, bahwa kelompok tingkat usia yang paling sedikit adalah usia 46-45 tahun keatas sejumlah 3 orang dengan presentase 10%, sedangkan responden terbanyak pada usia 31-35 tahun sejumlah 10 orang dengan presentase 33,3%, pada usia 26-30 tahun sejumlah 5 orang dengan presentase 16,6%, kemudian pada usia 36-40 sejumlah 7 orang dengan presentase 23,3%, dan pada usia 41-45 sejumlah 5 orang dengan presentase 16,6%.

3. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan menunjukkan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh responden, mulai dari pendidikan sekolah dasar hingga pendidikan sarjana. Untuk mengetahui tingkat pendidikan dari responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.III: Tingkat Pendidikan Responden

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|----|--------------------|--------|------------|
| 1 | SD/MI | 5 | 16,6% |
| 2 | SMP/MTs | 8 | 26,6% |
| 3 | SLTA/MA | 11 | 36,6 % |
| 4 | Diploma | 1 | 3,3 % |
| 5 | S.I | 5 | 16,6% |
| | | 30 | 100 % |

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden yang tamatan SD sejumlah 5 orang atau 16,6%, selanjutnya pada tamatan SMP/MTs sejumlah 8 orang atau 26,6%, kemudian tamatan SLTA/MA sejumlah 11 orang atau 36,6%, berikutnya tamatan Diploma sejumlah 1 orang atau 3,3% dan tamatan S.I

sejumlah 5 orang atau 16,6%. Maka dapat dilihat tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini didominasi responden yang tamatan SLTA/MA.

B. Hasil dan Pembahasan Peran Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Fisik Di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (Tahun 2018)

Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selanjutnya Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya keakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa,
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari sejumlah wewenang Kepala Desa diatas, maka salah satu wewenang Kepala Desa adalah Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara Partisipatif. Pasal 26 ayat 2, salah satu wewenang Kepala Desa adalah Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Berdasarkan pada pasal 78 ayat (1) pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Untuk menilai Peran Kepala Desa dalam Mengkoordinasi Pembangunan secara fisik di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (Tahun 2018) diukur dengan beberapa indikator, maka selanjutnya disini akan diuraikan hasil tanggapan responden berdasarkan kuisisioner dan wawancara yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembangunan

Bintoro Tjokroaminoto (2004:90) mendefinisikan perencanaan sebagai proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah serangkaian proses penentuan tindakan masa depan yang disertai pertimbangan yang logis dan kontinu untuk memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian, dari 105 angket yang disebarakan kepada responden hanya 30 angket yang kembali dan diisi oleh responden. maka diperoleh data tentang tanggapan responden, guna melihat bagaimana hasil tanggapan yang telah diberikan oleh para responden. Selanjutnya penulis akan menyajikan pada tabel berikut:

Tabel V.IV: Tanggapan Responden tentang Perencanaan Pembangunan

| No | Sub Indikator | Kategori Pengukuran | | | Jumlah Angket yang kembali | Jumlah |
|----|----------------------------------|---------------------|------------|-------------|----------------------------|--------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | | |
| 1. | Menyusun rencana pembangunan | 6 | 16 | 8 | 30 | 105 |
| 2. | Musyawaharah rencana pembangunan | 4 | 6 | 20 | 30 | 105 |
| | Jumlah | 10 | 22 | 28 | 60 | 210 |
| | Rata-rata | 5 | 11 | 14 | 30 | |
| | Persentase | 16,7% | 36,7% | 46,7% | 100% | 100% |
| | Kategori Pengukuran | Kurang Baik | | | | |

Sumber: Data Olahan Penulis 2018

Dari tabel V.VI tanggapan responden tentang perencanaan dapat dijelaskan bahwa sebanyak 16,7% jawaban responden mengatakan dalam kategori Baik, selanjutnya sebanyak 36,7% dari jawaban responden mengatakan Cukup Baik, dan sebanyak 46,7% dari responden mengatakan Kurang Baik.

Berdasarkan data frekuensi tanggapan atas jawaban responden dapat disimpulkan bahwa Peran Kepala Desa dalam Mengkoordinasi Pembangunan Fisik di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan untuk aspek Perencanaan yang meliputi Menyusun Rencana Pembangunan dan Musyawarah Rencana Pembangunan pada presentase 46,7% yang dikategorikan Kurang Baik, hal ini disebabkan karena Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan kurang berkoordinasi dengan masyarakat Desa Pematang Tinggi.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Andi Agus Setiawan sebagai Kepala Desa Pematang Tinggi mengenai proses perencanaan pembangunan pada hari senin tanggal 3 Desember 2018, beliau mengatakan:

“Kalau di Desa ini ada yang namanya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Jadi itu direncanakan selama 6 (enam) tahun yaitu sepanjang masa jabatan. Jadi dari awal menjabat sudah direncanakan RPJMD itu. RPJMD diambilnya dari RT-RT, jadi setiap RT dihimbau untuk musyawarah dilingkungan masing-masing. Apa-apa saja yang akan dibangun dilingkungan RT tersebut. Setelah masing-masing mengumpulkan aspirannya maka dibuat usyawahar dusun. Setelah semuanya tersusun baru melaksanakan musyawarah pembangunan desa jangka menengah, itulah yang menjadi RPJMD. Jadi dari RPJMD itu dipotong pertahun, pengerjaannya dilakukan secara bertahap. Jadi pembangunan itu selalu dimusyawarahkan bersama masyarakat desa”.

Perencanaan tentunya dibutuhkan dalam setiap kegiatan karena perencanaan merupakan awal dari penyusunan tujuan dan sasaran kemudian dilakukan pembuatan keputusan akan kegiatan yang akan dilakukan, khususnya dalam kegiatan pembangunan yang mana perencanaan tentang apa saja yang akan dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan apa manfaatnya untuk masyarakat sehingga hal ini dapat diprioritaskan. Namun dalam melaksanakan musyawarah masyarakat masih tergolong rendah karena sebagian besar hanya masyarakat-masyarakat desa tertentu yang diajak untuk bersosialisasi. Atau bisa dikatakan Kepala Desa kurang berkoordinasi kepada seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat dari lapisan bawah.

Berdasarkan hasil analisa diatas dapat dikatakan bahwa Peran Kepala Desa Pematang Tinggi dalam Merencanakan Pembangunan di Desa Pematang Tinggi untuk aspek Perencanaan Pembangunan yang meliputi menyusun rencana pembangunan dan musyawarah rencana pembangunan dikategorikan kurang baik.

2. Pembagian Kerja

Menurut Hasibuan (2007) Pembagian kerja yaitu informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Jadi, Pembagian kerja adalah analisis jabatan yang merupakan suatu aktivitas dalam menentukan apa pekerjaan yang dilakukan dan siapa yang harus melakukan tugas tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, dari 105 angket yang disebarakan kepada responden hanya 30 angket yang kembali dan diisi oleh responden. maka diperoleh data tentang tanggapan responden, guna melihat bagaimana hasil tanggapan yang telah diberikan oleh para responden. Selanjutnya penulis akan menyajikan pada tabel berikut:

Tabel V.V: Tanggapan Responden Tentang Pembagian Kerja

| No | Sub Indikator | Kategori Pengukuran | | | Jumlah Angket yang kembali | Jumlah |
|----|---------------------|---------------------|------------|-------------|----------------------------|--------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | | |
| 1. | Kebijakan | 8 | 12 | 10 | 30 | 105 |
| 2. | Strategi | 6 | 14 | 10 | 30 | 105 |
| | Jumlah | 14 | 26 | 20 | 60 | 210 |
| | Rata-rata | 7 | 13 | 10 | 30 | |
| | Persentase | 23,3% | 43,3% | 33,3% | 100% | 100% |
| | Kategori Pengukuran | Cukup Baik | | | | |

Sumber: Data Olahan Peneliti 2018

Data tabel V.V tanggapan responden tentang pembagian kerja dapat dijelaskan bahwa sebanyak 23,3% jawaban responden mengatakan dalam kategori Baik, selanjutnya sebanyak 43,3% dari jawaban responden mengatakan Cukup Baik, dan sebanyak 33,3% responden mengatakan Kurang Baik.

Berdasarkan data frekuensi tanggapan atas jawaban responden dapat disimpulkan bahwa Peran Kepala Desa dalam mengkoordinasi pembangunan di Desa

Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (Tahun 2018) untuk aspek Pembagian Kerjanya yang meliputi Kebijakan dan Strategi pada persentase 43,3% yang dikategorikan Cukup Baik, karena masih kurangnya Kebijakan dan Strategi yang dilakukan Kepala Desa dalam Mengkoordinasikan Pembangunan.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Andi Agus Setiawan sebagai Kepala Desa Pematang Tinggi tentang Kebijakan dan Strategi dalam mengkoordinasi pembangunan desa pada hari senin tanggal 3 Desember 2018, beliau mengatakan:

“Kami membangun apa yang memang dibutuhkan di Pematang Tinggi ini, misalnya tentang infrastruktur jalan desa. Memang banyak sekali yang bilang “masak pembangunan cuman itu-itulah saja” tapi memang inilah yang kita butuhkan saat ini, yang semua lapisan masyarakat bisa merasakannya langsung. Kalau seperti gedung tidak semua bisa menggunakannya. Karena semua perekonomian akan berjalan lancar kalau infrastruktur kita sudah baik semua. Jangan sampai semua gedung ada tersedia tetapi akses masuknya saja susah. Akhirnya ketertinggalan suatu daerah dikarenakan akses masuk yang tidak baik atau bisa dikatakan terisolir. Dalam menjalankan program-program kita ini selain biaya yang menjadi penghambatnya juga dari masyarakatnya juga yang kadang tidak paham dengan apa-apa saja yang dilakukan oleh perangkat-perangkat desa.”

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Kepala Desa Pematang Tinggi dalam aspek pembagian kerja sudah melakukan kebijakan dan strategi dengan baik. Namun didalam pelaksanaan masih ada hambatan-hambatan yang ada selain dari biaya hambatan juga datang dari ketidak pahaman masyarakat desa tentang kebijakan dan strategi yang dilakukan kepada Kepala Desa. Ini semua karena kurangnya koordinasi dari kepala Desa dengan masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dikatakan bahwa Peran Kepala Desa dalam mengkoordinasi pembangunan di Desa Pematang Tinggi untuk aspek pembagian kerja yang meliputi kebijakan dan strategi dikategorikan Cukup baik.

3. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang bertujuan untuk memberitahu, mengemukakan pendapat, dan mengubah perilaku atau mengubah sikap yang dilakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Empat komponen inti dari komunikasi adalah sumber, penerima, pesan dan saluran (Lydia Harliana Martono & Satya Joewana dalam buku Menangkal Narkoba dan Kekerasan:2008). Jadi, Komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh data tentang tanggapan responden, guna melihat bagaimana hasil tanggapan yang telah diberikan oleh para responden. Selanjutnya penulis akan menyajikan pada tabel berikut:

Tabel V.VI: Tanggapan Responden Tentang Komunikasi

| No | Sub Indikator | Kategori Pengukuran | | | Jumlah Angket yang kembali | Jumlah |
|----|-----------------------------------------|---------------------|------------|-------------|----------------------------|--------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | | |
| 1. | Komunikasi Langsung | 4 | 10 | 16 | 30 | 105 |
| 2. | Komunikasi Tidak Langsung atau Tertulis | 6 | 14 | 10 | 30 | 105 |
| | Jumlah | 10 | 24 | 26 | 60 | 210 |
| | Rata-rata | 5 | 12 | 13 | 30 | 105 |
| | Persentase | 16,6% | 40% | 43,3% | 100% | 100% |
| | Kategori Pengukuran | Kurang Baik | | | | |

Sumber: Data Olahan Peneliti 2018

Dari tabel V.VI tanggapan tentang komunikasi dapat dijelaskan bahwa sebanyak 16,6% jawaban responden mengatakan dalam kategori Baik, selanjutnya sebanyak 40% jawaban responden mengatakan Cukup Baik dan sebanyak 43,3% jawaban responden mengatakan Kurang Baik.

Berdasarkan data frekuensi tanggapan diatas jawaban responden dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa dalam mengkoordinasi pembangunan di Desa Pematang Tinggi untuk aspek Komunikasi yang meliputi Komunikasi Langsung dan Komunikasi Tidak Langsung pada persentase 43,3% yang dikategorikan Kurang Baik, karena Kepala Desa tidak berkoordinasi langsung dengan masyarakat desa.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Andi Agus Setiawan sebagai Kepala Desa Pematang Tinggi tentang apakah setiap pelaksanaan pembangunan ada

pemberitahuan informasi terlebih dahulu pada hari senin taggal 3 Desember 2018, beliau mengatakan:

“Sebulan sebelum mengadakan pembangunan sudah disampaikan, apa yang akan dibangun. Kami memberi informasi melalui Kadus (Kepala Dusun). Dari sini kami sampaikan kepada Kadus bahwasanya akan ada pembangunan, setelah itu Kadus menyampaikan ke RT masing-masing. Disitulah diadakan musyawarah, nanti barulah diatur proses pembangunannya. Jadi materialnya sampai langsung dikerjakan.”

Kepala Desa bersama perangkat desa yaitu Kadus telah memberikan informasi kepada masyarakat tentang pembangunan melalui musyawarah. Maka berdasarkan analisa diatas dapat dikatakan bahwa koordinasi pembangunan di Desa Pematang Tinggi dalam aspek Komunikasi yang meliputi Komunikasi Langsung dan Tidak Langsung dikategorikan Kurang Baik.

4. Pengawasan

Pengawasan menurut Fayol (dalam Sukarna, 2011:111) adalah pemeriksaan apakah suatu yang terjadi sesuai dengan rencana, intruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Menurut Siagian (2003:115) agar pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, dapat digunakan beberapa teknik pengawasan adalah:

- a. Teknik pengawasan langsung, yaitu apabila pemimpin organisasi/pemerintah melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan sedang dijalankan dengan beberapa bentuk seperti inpeksi langsung.

b. Teknik pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan yang berbentuk laporan tulisan dan lisan.

Berdasarkan pengertian diatas jelaslah bahwa koordinasi adalah tindakan seseorang yang dilaksanakan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha kearah keselarasan kerja antar anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Tabel V.VII: Tanggapan Responden Tentang Pengawasan

| No | Sub Indikator | Kategori Pengukuran | | | Jumlah angket yang kembali | Jumlah |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|----------------------------|--------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | | |
| 1. | Peran Kepala desa dalam mengawasi pembangunan | 8 | 12 | 10 | 30 | 105 |
| 2. | Pengawasan masyarakat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan | 2 | 20 | 8 | 30 | 105 |
| | Jumlah | 10 | 32 | 18 | 60 | 210 |
| | Rata-rata | 5 | 16 | 9 | 30 | 105 |
| | Persentase | 16,6% | 53,3% | 30% | 100% | 100% |
| | Kategori Pengukuran | Cukup Baik | | | | |

Sumber: Data Olahan Peneliti 2018

Dari tabel V.VIII tanggapan responden tentang pengawasan dapat dijelaskan bahwa sebanyak 16,6% jawaban responden mengatakan Baik, selanjutnya sebanyak

53,3% jawaban responden mengatakan Cukup Baik dan sebanyak 30% jawaban responden mengatakan Kurang Baik.

Berdasarkan data frekuensi tanggapan atau jawaban responden dapat disimpulkan bahwa Peran Kepala Desa dalam Mengkoordinasi Pembangunan di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan untuk aspek pengawasan meliputi Peran Kepala Desa dalam mengawasi pembangunan dan Pengawasan masyarakat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada persentase 53,3% yang dikategorikan Cukup Baik, karena Kepala Desa dalam hal ini turut ikut serta dalam mengawasi pembangunan.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Andi Agus Setiawan sebagai Kepala Desa Pematang Tinggi tentang Peran Kepala Desa dalam mengawasi pembangunan dan Pengawasan masyarakat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada hari senin 3 Desember 2018, beliau mengatakan:

“ Semua komponen masyarakat ikut mengawasi jalannya pembangunan. Karena selain mengawasi mereka juga ikut bekerja. Apa-apa saja yang dibutuhkan mereka tahu karena mereka sendiri yang bekerja. Jadi kita disini mengawasi proses pembangunan itu ya sekaligus masyarakat itu yang mengerjakannya.”

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Desa Pematang Tinggi mengenai Peran Kepala Desa dalam mengawasi pembangunan dan Pengawasan masyarakat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maka berdasarkan hasil analisa diatas dapat dikatakan bahwa untuk aspek Pengawasan dikategorikan Cukup Baik.

Dari empat indikator mengenai Peran Kepala Desa dalam Mengkoordinasi Pembangunan Secara Fisik di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, selanjutnya analisis yang telah dibuat diatas maka dapat ditarik rekapitulasi dari jawaban responden tersebut yang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.VIII: Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Peran Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Fisik di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

| No | Sub Indikator | Kategori Responden | | | Jumlah |
|----|---------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| 1. | Perencanaan | 5 (16,7%) | 11 (36,7%) | 14 (46,7%) | 30 100% |
| 2. | Pembagian Kerja | 7 (23,3%) | 13 (43,3%) | 10 (33,3%) | 30 100% |
| 3. | Komunikasi | 5 (16,6%) | 12 (40%) | 13 (43,3%) | 30 100% |
| 4. | Pengawasan | 5 (16,6%) | 16 (53,3%) | 9 (30%) | 30 100% |
| | Jumlah | 22 | 52 | 46 | 120 |
| | Rata-rata | 6 | 13 | 12 | 30 |
| | Persentase | 18,33% | 43,33% | 38,33% | 100% |
| | Kategori Pengukuran | Cukup Baik | | | |

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2018

Dengan melihat tabel rekapitulasi jawaban responden diatas mengenai Peran Kepala Desa dalam Mengkoordinasi pembangunan Fisik di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (Tahun 2018) diketahui bahwa

sebanyak 18,33% responden yang mengatakan Baik, kemudian sebanyak 43,33% responden mengatakan Cukup Baik, dan yang mengatakan Kurang Baik sebanyak 38,33%.

Dari tabel rekapitulasi diatas maka dapat dianalisa bahwa Kepala Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan untuk aspek Perencanaan yang meliputi Menyusun Rencana Pembangunan dan Musyawarah Rencana Pembangunan dikategorikan Kurang Baik, hal ini disebabkan karena Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan kurang berkoordinasi dengan masyarakat Desa Pematang Tinggi. Selanjutnya, dalam pembagian kerja yang meliputi Kebijakan dan Strategi dikategorikan Cukup Baik, karena masih kurangnya Kebijakan dan Strategi yang dilakukan Kepala Desa dalam Mengkoordinasikan Pembangunan. Kemudian dalam aspek Komunikasi yang meliputi Komunikasi Langsung dan Komunikasi Tidak Langsung dikategorikan Kurang Baik, karena Kepala Desa tidak berkoordinasi langsung dengan masyarakat desa. Dan dalam aspek Pengawasan pembangunan dikategorikan Cukup Baik, karena Kepala Desa dalam hal ini turut ikut serta dalam mengawasi pembangunan.

C. Hambatan Tentang Peran Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Fisik Di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat peran kepala desa dalam mengkoordinasi pembangunan fisik di desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya aparat pemerintah yang mementingkan bagiannya masing-masing, sehingga menghambat suatu kinerja dalam mengerjakan tugasnya dan tingkat pemahaman serta pengetahuan aparat dalam menjalankan fungsi koordinasi terkait dengan proses penyelenggaraan pembangunan yang kurang, dimana pelayanan memerlukan suatu pengetahuan dan keterampilan.
2. Keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah Desa Pematang Tinggi merupakan salah satu penghambat dalam melakukan pembangunan. Dana bantuan yang diterima oleh pemerintah desa hanya diperlukan untuk prioritas perencanaan pembangunan saja, sehingga masih banyak program atau rencana yang belum terealisasi karena kurangnya anggaran diterima oleh pemerintah desa.
3. Kurangnya koordinasi Kepala Desa kepada masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, sehingga masyarakat kurang memahami apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai Peran Kepala Desa dalam Mengkoordinasi Pembangunan Fisik di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (Tahun 2018), di dapatkan hasil penelitian melalui kuisisioner, wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kepala Desa dalam Mengkoordinasi Pembangunan Fisik di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, bahwa mulai tahap penyusunan perencanaan sampai dengan evaluasi keberhasilan rencana pembangunan yang mendapat tanggapan dari masyarakat tentang pembangunan yang ada di desa dari hasil rekapitulasi tanggapan responden menjawab cukup baik. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dan sosialisasi dari pemerintah desa dalam menyusun, menetapkan rencana pembangunan dan melaksanakan pembangunan.
2. Koordinasi Kepala Desa dalam pembangunan desa secara partisipatif sudah berjalan cukup baik. Kepala desa selaku koordinasi telah

menjalankan peran sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai koordinasi dalam kegiatan program pembangunan.

B. Saran

Dari hasil penelitian adapun yang menjadi saran penulis sebagai berikut:

1. Kepala Desa harus memberikan pengarahan, pelatihan dan juga koordinasi kepada aparatur pemerintah desa supaya aparatur pemerintah desa bisa bertanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi pembangunan pada desa yang bertujuan untuk pembangunan desa.
2. Kepala Desa harus bisa lebih berkoordinasi dengan instansi terkait, agar mendapatkan anggaran tambahan untuk meningkatkan pembangunan fisik maupun non fisik yang ada di desa.
3. Kepala Desa harus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa yang menjadi tujuan pembangunan, sehingga partisipasi masyarakat dalam berkoordinasi dalam pembangunan bisa lebih efektif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta
- Bugin, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta. PT. Prenada Media
- Fisipol Uir. 2013. *Buku Pedoman Penulis Usulan Penelitian, Skripsi Dan Kertas Kerja Mahasiswa*, Pekanbaru. Fisipol Uir
- Handoko, Hani. 2003. *Pengantar Manajemen*. BPFE. Yogyakarta
- Hanif, Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Maulidiah, Sri. Dan Rauf, Rahyunir. 2015. *Pemerintahan Desa*. Zanafa Publishing. Pekanbaru
- Melayu, Hasibuan. 2006. *Tinjauan Teoritis Tentang Koordinasi Dan Karyawan*. PT Raja Gasindo Persada. Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) jilid 1*. PT Rineka Cipta. Jakarta

- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Pess. Yogyakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Dimensi-dimensi Ilmu Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara. Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Keybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Sinar Baru. Bandung
- Parawoto. 1997. *Pembangunan Partisipasi*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Pasalog, Harbani. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Bumi Aksara. Jakarta
- Riduawan. 2009. *Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Alfabeta. Bandung
- Riyadi dan Bratakusuma. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Bumi Aksara. Jakarta
- Siagian, Sondang. 2012. *Teori Pembangunan Organisasi*. Bumi Aksara. Jakarta
- Siregar, sofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Kencana. Jakarta
- Soehartono, Irawan. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung

Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Bandung

Syafie, Inu Kencana. 2013. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT Refika Aditama.

Bandung

Syafie, Inu Kencana. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. PT Bumi Aksara. Jakarta

Wasistono, Sadu dan Tahir M Irwan. 2007. *Prospek Pembangunan Desa*. CV

Fokusmedia-Anggota IKAPI. Bandung

Wijaya, Mendra. Dan Awang, Azam. 2011. *Sistem Pemerintahan Daerah Di*

Indonesia, Alaf Riau. Pekanbaru

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & Penelitian Gabungan*.

Prenada Group. Jakarta

Zulkifli Dkk. 2013. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, Dan Kertas*

Kerja Mahasiswa. Fisipol Uir. Pekanbaru

Dokumentasi:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Permendagri No. 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (SOTK)

Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Permendagri No. 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga
Kemasyarakatan

Permendagri No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan
Dan Pemberhentian Perangkat Desa

